



**PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK**

**RENCANA KERJA
(RENJA)**

2024

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

**KOMPLEKS PERKANTORAN TERPADU MANGGARAWAN
JALAN RAYA MANGGAR - GANTUNG DSN. MANGGARAWAN DESA PADANG – KEC. MANGGAR 33516 TELP. 0719-9220049**



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR :188. 45-716 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2024

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 125 huruf a, perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024;
 - b. bahwa pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klafikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 09 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Belitung Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 85);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 19);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 02 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 Nomor 02);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2024.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 26 Desember 2022

BUPATI BELITUNG TIMUR,

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, cursive letters that appear to be 'B' and 'U' followed by a long vertical stroke.

BURHANUDIN

**TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2024**

**I. TIM PENYUSUN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
BELITUNG TIMUR TAHUN 2024**

NO.	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah	Ketua Tim
2.	Kepala Bagian Keuangan dan Perencanaan	Sekretaris
3.	Perencana Ahli Muda	Anggota
Kelompok Kerja I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		
1.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Ketua Pokja I
2.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama	Anggota
3.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	Anggota
4.	Kepala Bagian Hukum	Anggota
5.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama	Anggota
6.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bagian Kesejahteraan Rakyat	Anggota
7.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Bagian Hukum	Anggota
Kelompok Kerja II Perekonomian dan Pembangunan		
1.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Ketua Pokja II
2.	Kepala Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam	Anggota
3.	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Anggota
4.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam	Anggota
5.	Kepala Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	Anggota
6.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda	Anggota
Kelompok Kerja III Administrasi Umum		
1.	Asisten Administrasi Umum	Ketua Pokja III
2.	Kepala Bagian Umum	Anggota
3.	Kepala Bagian Organisasi	Anggota
4.	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Anggota
5.	Analisis Kepegawaian Muda	Anggota
6.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bagian Organisasi	Anggota
7.	Kepala Sub Bagian Protokol	Anggota
8.	Pranata Humas Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Anggota
9.	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	Anggota

II. TIM PENYUSUN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2024

NO.	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Ketua
2.	Kepala Bagian Umum dan Keuangan	Sekretaris
3.	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	Anggota
4.	Sub Koordinator Program dan Keuangan	Anggota
Kelompok Kerja I Bagian Persidangan dan Perundang-undangan		
5.	Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan	Ketua Pokja I
6.	Sub koordinator kajian perundangan-undangan	Anggota
7.	Sub koordinator Persidangan, Hubungan masyarakat dan Protokol	Anggota
Kelompok Kerja II Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan		
8.	Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	Ketua Pokja II
9.	Sub koordinator Fasilitasi Penganggaran	Anggota
10.	Sub koordinator Fasilitasi Pengawasan	Anggota

III. TIM PENYUSUN RENCANA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2024

NO	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Inspektur	Ketua Tim
2.	Sekretaris	Sekretaris Tim
3.	Perencana	Anggota
4.	Kasubbag Administrasi Umum	Anggota
Kelompok Kerja I Bidang Pemerintahan		
5.	Inspektur Bidang Pemerintahan	Ketua Pokja I
6.	Auditor Bidang Pemerintahan	Anggota
7.	PPUPD Bidang Pemerintahan	Anggota
Kelompok Kerja II Bidang Investigasi		
8.	Inspektur Bidang Investigasi	Ketua Pokja II
9.	Auditor Bidang Investigasi	Anggota
10.	PPUPD Bidang Investigasi	Anggota
Kelompok Kerja III Bidang Kesejahteraan Rakyat		
11.	Inspektur Bidang Kesejahteraan Rakyat	Ketua Pokja III
12.	Auditor Bidang Kesejahteraan Rakyat	Anggota
13.	PPUPD Bidang Kesejahteraan Rakyat	Anggota
Kelompok Kerja IV Bidang Perekonomian dan Pembangunan		
14.	Inspektur Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Ketua Pokja IV
15.	Auditor Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Anggota
16.	PPUPD Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Anggota
17.	Pengelola Evaluasi Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan	Anggota

IV. TIM PENYUSUN RENCANA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2024

NO.	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala Badan	Ketua
2.	Sekretaris Badan	Sekretaris
3.	Subbagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
4.	Subkoordinator Keuangan	Anggota
5.	Subkoordinator Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Anggota
Kelompok Kerja I Bidang Anggaran		
1.	Kepala Bidang Anggaran	Ketua Pokja I
2.	Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran	Anggota
3.	Kepala Sub Bidang Pengendalian Anggaran	Anggota
Kelompok Kerja II Bidang Data dan Informasi Pajak		
1.	Kepala Bidang Data dan Informasi Pajak	Ketua Pokja II
2.	Kepala Sub Bidang Ekstensifikasi Pajak	Anggota
3.	Kepala Sub Bidang Pengolahan data dan Informasi Pajak	Anggota
Kelompok Kerja III Bidang Penetapan dan Penagihan Pajak		
1.	Kepala Bidang Penetapan dan Penagihan Pajak	Ketua Pokja III
2.	Kepala Sub Bidang Penetapan dan Penagihan Pajak	Anggota
3.	Kepala Sub Bidang Pengawasan, Pemeriksaan dan Pelaporan	Anggota
Kelompok Kerja IV Bidang Perbendaharaan		
1.	Kepala Bidang Perbendaharaan	Ketua Pokja IV
2.	Kepala Sub Bidang Koordinator Belanja Tidak langsung	Anggota
3.	Kepala Sub Bidang Belanja langsung	Anggota
4.	Kepala Sub Bidang Administrasi Perbendaharaan	Anggota
Kelompok Kerja V Bidang Akuntansi dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah		
1.	Kepala Bidang Akuntansi dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	Ketua Pokja V
2.	Kepala Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan	Anggota
3.	Kepala Sub Bidang Pertanggungjawaban dan Informasi Keuangan Daerah	Anggota
Kelompok Kerja VI Bidang Kekayaan Daerah		
1.	Kepala Bidang Kekayaan Daerah	Ketua Pokja VI
2.	Kepala Sub koordinator Inventarisasi dan Penilaian	Anggota
3.	Kepala Sub Perencanaan dan pemanfaatan	Anggota
4.	Kepala Sub Pengendalian dan Penatausahaan	Anggota

V. TIM PENYUSUN RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2024

NO.	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala Badan	Ketua
2.	Sekretaris Badan	Sekretaris 1
3.	Perencana Ahli Muda	Anggota
Kelompok Kerja I Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah		
4.	Kepala Bidang	Ketua Pokja I
5.	Perencana Ahli Muda	Anggota
6.	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
7.	Calon Perencana Ahli Pertama	Anggota
Kelompok Kerja II Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah		
8.	Kepala Bidang	Ketua Pokja II
9.	Perencana Ahli Muda	Anggota
10.	Peneliti Ahli Muda	Anggota
11.	Perekayasa Ahli Muda	Anggota
12.	Calon Perencana Ahli Pertama	Anggota
Kelompok Kerja III Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		
13.	Kepala Bidang	Ketua Pokja III
14.	Perencana Ahli Muda	Anggota
15.	Calon Perencana Ahli Pertama	Anggota
Kelompok Kerja IV Bidang Perekonomian, Sumber daya alam, Infrastruktur dan kewilayahan		
16.	Kepala Bidang	Ketua Pokja IV
17.	Perencana Ahli Muda	Anggota
18.	Perencana Ahli Pertama	Anggota

VI. TIM PENYUSUN RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2024

NO.	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala Badan	Ketua
2.	Sekretaris Badan	Anggota
3.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Anggota
4.	Kepala Bagian Umum dan Kepegawain	Anggota
Kelompok Kerja I Bidang Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja Aparatur		
1.	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja Aparatur	Ketua Pokja I
2.	Sub Koordinator Penilaian Kinerja dan Penghargaan Aparatur	Anggota

NO.	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
3.	Subkoordinator Penjurangan, Sertifikasi dan Teknis Fungsional	Anggota
Kelompok Kerja II Bidang Mutasi dan Promosi Aparatur		
1.	Kepala Bidang Mutasi dan Promosi Aparatur	Ketua Pokja II
2.	Sub koordinator Mutasi dan Kepangkatan	Anggota
3.	Sub koordinator Pengembangan karir dan Promosi Aparatur	Anggota
Kelompok Kerja III Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Aparatur		
1.	Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Aparatur	Ketua Pokja III
2.	Sub koordinator Pengadaan dan Pemberhentian	Anggota
3.	Sub koordinator Data, Informasi dan Fasilitas Profesi Aparatur Sipil Negara	Anggota

VII. TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2024

NO.	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas	Ketua
2.	Sekretaris Dinas	Sekretaris
3.	Perencana Ahli Muda	Anggota
Kelompok Kerja I Bidang Pembinaan Anak Usia Dini dan Pembinaan Masyarakat		
4.	Kepala Bidang PAUD	Ketua Pokja I
5.	Kepala Seksi PAUD	Anggota
6.	Kepala Seksi Pendidikan Masyarakat dan Kursus	Anggota
Kelompok Kerja II Bidang Pembinaan Sekolah Dasar		
7.	Kepala Bidang SD	Ketua Pokja II
8.	Kepala Seksi Kurikulum	Anggota
9.	Kepala Seksi Program, Data dan Sarana Prasarana	Anggota
Kelompok Kerja III Bidang Sekolah Menengah Pertama		
10.	Kepala Bidang SMP	Ketua Pokja III
11.	Kepala Seksi Kurikulum	Anggota
12.	Kepala Seksi Kesiswaan dan Peningkatan Mutu	Anggota
Kelompok Kerja IV Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan		
13.	Kepala Bidang PTK	Ketua Pokja IV
14.	Kepala Seksi PTK PAUD	Anggota
15.	Kepala Seksi PTK SD	Anggota

VIII. TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2024

NO.	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas	Ketua
2.	Sekretaris Dinas	Sekretaris
Kelompok Kerja I Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan		
3.	Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan	Ketua Pokja I
4.	Analisis Pembayaran Jaminan Kesehatan	Anggota
5.	Administrator Kesehatan Ahli Muda	Anggota
6.	Pengelola Obat dan Alat Kesehatan	Anggota
Kelompok Kerja II Bidang Kesehatan Masyarakat		
7.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	Ketua Pokja II
8.	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Muda	Anggota
9.	Sanitarian Ahli Muda	Anggota
10.	Administrator Kesehatan Ahli Muda	
Kelompok Kerja III Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit		
11.	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Ketua Pokja III
12.	Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda	Anggota
13.	Entomolog Kesehatan Ahli Muda	Anggota
14.	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
Kelompok Kerja IV Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		
15.	Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Ketua Pokja IV
16.	Penyusun Bahan Ketahanan Keluarga	Anggota
17.	Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda	Anggota
18.	Pemeriksa Pelayanan Keluarga Berencana	Anggota
Kelompok Kerja V Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan		
19.	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan	Ketua Pokja V
20.	Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda	Anggota
21.	Pengelola Advokasi Konseling dan Pembinaan KB dan Kesehatan Reproduksi	Anggota
22.	Penyusun Bahan Data Kependudukan dan KB	Anggota
Kelompok Kerja VI		
23.	Perencana Ahli Muda	Ketua Pokja VI
24.	Analisis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	Anggota
25.	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	Anggota
26.	Pengelola Perencana	Anggota
27.	Direktur RSUD Muhammad Zen	Anggota
28.	Kepala UPT Puskesmas Manggar	Anggota
29.	Kepala UPT Puskesmas Mengkubang	Anggota

NO.	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
30.	Kepala UPT Puskesmas Kelapa Kampit	Anggota
31.	Kepala UPT Puskesmas Renggiang	Anggota
32.	Kepala UPT Puskesmas Gantung	Anggota
33.	Kepala UPT Puskesmas Simpang Pesak	Anggota
34.	Kepala UPT Puskesmas Dendang	Anggota

IX. TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2024

NO.	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas	Ketua
2.	Sekretaris Dinas	Sekretaris
3.	Fungsional Perencana Ahli Muda	Anggota
4.	Kasubbag Keuangan	Anggota
5.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
Kelompok Kerja I Bidang Penataan Lingkungan		
6.	Kepala Bidang Penataan Lingkungan	Ketua Pokja I
7.	Fungsional Pengawas Lingkungan Ahli Muda	Anggota
8.	Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama	Anggota
9.	Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Pertama	Anggota
Kelompok Kerja II Bidang Persampahan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan		
10.	Kepala Bidang Persampahan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan	Ketua Pokja II
11.	Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda	Anggota
12.	Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda	Anggota
Kelompok Kerja III Bidang Tata Lingkungan		
13.	Kepala Bidang Tata Lingkungan	Ketua Pokja III
14.	Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda	Anggota
15.	Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda	Anggota
16.	Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda	Anggota
Kelompok Kerja IV Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan		
17.	Kepala Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan	Ketua Pokja IV
18.	Kepala UPT Laboratorium	Anggota
19.	Fungsional Pengawas Lingkungan Ahli Muda	Anggota
20.	Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda	Anggota
21.	Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Pertama	Anggota

X. TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2024

NO.	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas	Ketua Tim
2.	Sekretaris Dinas	Sekretaris Tim
3.	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
4.	Kasubag Keuangan	Anggota
5.	Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Anggota
Kelompok Kerja I Bidang Bina Marga		
6.	Kepala Bidang Bina Marga	Ketua Pokja I
7.	Kepala Sub Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan	Anggota
8.	Kepala Sub Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Anggota
9.	Kepala Sub Bidang Peralatan dan Laboratorium	Anggota
Kelompok Kerja II Bidang Sumber Daya Air		
10.	Kepala Bidang Sumber Daya Air	Ketua Pokja II
11.	Kepala Sub Bidang Pengelolaan Irigasi dan Jaringan Pemanfaatan Air	Anggota
12.	Kepala Sub Bidang Pengelolaan Jaringan Sumber Air	Anggota
Kelompok Kerja III Bidang Cipta Karya		
13.	Kepala Bidang Cipta Karya	Ketua Pokja III
14.	Kepala Sub Bidang Penataan Bangunan	Anggota
15.	Kepala Sub Bidang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Anggota
16.	Kepala Sub Bidang Penataan Drainase	Anggota
17.	Kepala UPTD SPAM	Anggota
Kelompok Kerja IV Bidang Penataan Ruang		
18.	Kepala Bidang Penataan Ruang	Ketua Pokja IV
19.	Kepala Sub Bidang Perencanaan Tata Ruang	Anggota
20.	Kepala Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang	Anggota
21.	Kepala Seksi Pertanahan	Anggota

XI. TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2024

NO.	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas	Ketua
2.	Sekretaris Dinas	Sekretaris
3.	Kasubbag Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Anggota
4.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
Kelompok Kerja I Bidang Penataan Perumahan		

NO.	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
5.	Kepala Bidang Penataan Perumahan	Ketua Pokja I
6.	Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda	Anggota
7.	Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Pertama	Anggota
Kelompok Kerja II Bidang Penataan Kawasan Permukiman		
8.	Kepala Bidang Penataan Kawasan Permukiman	Ketua Pokja II
9.	Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Pertama	Anggota

XII. TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2024

NO.	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas	Ketua
2.	Sekretaris Dinas	Sekretaris
3.	Perencana Ahli Muda	Anggota
4.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
5.	Analisis Keuangan Pusat dan daerah Ahli Muda	Anggota
Kelompok Kerja I Bidang Penyelenggaraan E-Government		
6.	Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government	Ketua Pokja I
7.	Pratama Komputer Ahli Muda	Anggota
8.	Pratama Komputer Ahli Pertama	Anggota
Kelompok Kerja II Bidang Informasi dan Komunikasi Publik		
9.	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Ketua Pokja II
10.	Pranata Humas Ahli Muda	Anggota
11.	Penyusunan bahan Informasi dan Publikasi	Anggota
Kelompok Kerja III Bidang Keamanan Informasi, Persandian dan Statistik		
12.	Kepala Bidang Keamanan Informasi, Persandian dan Statistik	Ketua Pokja III
13.	Statistisi Ahli Muda	Anggota

XIII. TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2024

NO.	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas	Ketua
2.	Sekretaris Dinas	Sekretaris
3.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, dan Pelaporan	Anggota
4.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota

Kelompok Kerja I Bidang Lalu Lintas Jalan		
5.	Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan	Ketua Pokja I
6.	Kepala Seksi Perlengkapan Jalan	Anggota
7.	Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Anggota
8.	Analisis Kebijakan	Anggota
Kelompok Kerja II Bidang Angkutan Jalan		
9.	Kepala Bidang Angkutan Jalan	Ketua Pokja II
10.	Kepala Seksi Angkutan Tidak Dalam Trayek dan Barang	Anggota
11.	Kepala Seksi Angkutan Dalam Trayek dan terminal	Anggota
Kelompok Kerja III Bidang Pelayaran		
12.	Kepala Bidang Pelayaran	Ketua Pokja III
13.	Kepala Seksi Lalu Lintas Angkutan Perairan	Anggota
14.	Kepala Seksi Kepelabuhanan	Anggota

XIV. TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS PERIKANAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024

No.	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas	Ketua Tim
2.	Sekretaris Dinas	Sekretaris Tim
Kelompok Kerja I Bidang Kesekretariatan		
3.	Analisis Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan	Ketua Pokja I
4.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
5.	Arsiparis Pelaksana Lanjutan	Anggota
Kelompok Kerja II Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pengelolaan Wilayah Pesisir		
6.	Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pengelolaan Wilayah Pesisir	Ketua Pokja II
7.	Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda	Anggota
8.	Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Muda	Anggota
9.	Analisis Alat Penangkap Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan	Anggota
10.	Analisis Konservasi dan Rehabilitasi Wilayah Pesisir	Anggota
Kelompok Kerja III Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan		
11.	Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Ketua Pokja III
12.	Analisis Akuakultur Ahli Muda	Anggota
13.	Analisis Benih	Anggota
Kelompok Kerja IV Bidang Pengolahan Usaha dan Diversifikasi Produk Perikanan		
14.	Kepala Bidang Pengolahan Usaha dan Diversifikasi Produk Perikanan	Ketua Pokja IV
15.	Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Muda	Anggota
16.	Analisis Mutu Hasil Perikanan	Anggota

XV. TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2024

NO.	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas	Ketua
2.	Sekretaris Dinas	Sekretaris
3.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
4.	Fungsional Perencana	Anggota
5.	Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah	Anggota
Kelompok Kerja I Bidang Promosi dan Perencanaan Penanaman Modal		
1.	Kepala Bidang Promosi dan Perencanaan Penanaman Modal	Ketua Pokja I
2.	Fungsional Analis Kebijakan	Anggota
Kelompok Kerja II Bidang Pelayanan Perizinan		
1.	Kepala Bidang Pelayanan Perizinan	Ketua Pokja II
2.	Fungsional Analis Kebijakan	Anggota
Kelompok Kerja III Bidang Pengendalian, Informasi dan Dokumentasi		
1.	Kepala Bidang Pengendalian, Informasi dan Dokumentasi	Ketua Pokja III
2.	Fungsional Analis Kebijakan	Anggota
Kelompok Kerja IV Bidang Perdagangan		
1.	Kepala Bidang Perdagangan	Ketua Pokja IV
2.	Fungsional Penera	Anggota
3.	Fungsional Pengawas Kemetrolagian	Anggota
4.	Fungsional Perdagangan	Anggota
5.	Fungsional Analis Perdagangan	Anggota
Kelompok Kerja IV Bidang Perindustrian		
1.	Kepala Bidang Perindustrian	Ketua Pokja V
2.	Fungsional Penyuluh Perindag	Anggota

XVI. TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2024

NO.	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas	Ketua
2.	Sekretaris Dinas	Sekretaris
3.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
4.	Sub Koordinator Keuangan (JFT Analis Keuangan Pusat dan Daerah)	Anggota
5.	Sub Koordinator Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan (JFT Perencanaan)	Anggota
Kelompok Kerja I Bidang Kebudayaan		
6.	Kepala Bidang Kebudayaan	Ketua Pokja I

NO.	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
7.	Sub Koordinator Kesenian (JFT Pamong Budaya)	Anggota
8.	Sub Koordinator Warisan Tradisi (JFT Pamong Budaya)	Anggota
9.	Sub Koordinator Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman (JFT Pamong Budaya)	Anggota
Kelompok Kerja II Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata		
10.	Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata	Ketua Pokja II
11.	Sub Koordinator Destinasi Wisata (Adyatama Kepariwisataan)	Anggota
12.	Sub Koordinator Industri Pariwisata (Adyatama Kepariwisataan)	Anggota
Kelompok Kerja III Bidang Pemasaran Pariwisata dan Kelembagaan Kepariwisataan		
13.	Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata dan Kelembagaan Kepariwisataan	Ketua Pokja III
14.	Sub Koordinator Pemasaran Pariwisata (Adyatama Kepariwisataan)	Anggota
15.	Sub Koordinator Kelembagaan Kepariwisataan (Adyatama Kepariwisataan)	Anggota

XVII. TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2024

No.	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Ketua Tim
2.	Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Sekretaris Tim
3.	Kassubag Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Anggota
Kelompok Kerja I Bidang Koperasi dan UKM		
3.	Kepala Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Ketua Pokja I
4.	JF. Pengawas Koperasi	Anggota
Kelompok Kerja II Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja		
5.	Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja	Ketua Pokja II
6.	JF. Instruktur	Anggota
7.	JF. Pengantar Kerja	Anggota
Kelompok Kerja III Bidang Hubungan Industrial dan Jamsostek		
8.	Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jamsostek	Ketua Pokja III
9.	JF. Mediator	Anggota

XVIII. TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2024

NO.	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas	Ketua
2.	Sekretaris Dinas	Sekretaris
3.	Perencana Ahli Muda	Anggota
Kelompok Kerja I Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial		
4.	Kepala Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial	Ketua Pokja I
5.	Penyuluh Sosial Ahli Muda	Anggota
Kelompok Kerja II Bidang Pemberdayaan Sosial		
6.	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial	Ketua Pokja II
Kelompok Kerja III Bidang Penataan, Kerjasama dan Administrasi Pemerintahan Desa		
7.	Kepala Bidang Penataan, Kerjasama dan Administrasi Pemerintahan Desa	Ketua Pokja III
8.	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
Kelompok Kerja IV Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan		
9.	Kepala Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan	Ketua Pokja IV
10.	Penggerak Swadaya masyarakat	Anggota
Kelompok Kerja V Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
11.	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Ketua Pokja V
12.	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
Kelompok Kerja VI UPT Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak		
13.	Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak	Ketua Pokja VI

XIX. TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2024

NO.	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas	Ketua Tim
2.	Sekretaris Dinas	Sekretaris
3.	Perencana Ahli Muda	Anggota
4.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	Anggota
5.	Kasubbag Umum dan Kepegawain	Anggota
6.	Kepala UPTD Perbenihan	Anggota
Kelompok Kerja I Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura		
1.	Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura	Ketua Pokja I
2.	Pengawas Alat dan Mesin Pertanian	Anggota
3.	Analisis Pasar Hasil Pertanian	Anggota
4.	Pengendali Organisme Pengganggu tanaman	Anggota

NO.	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
Kelompok Kerja II Bidang Perkebunan		
1.	Kepala Bidang Perkebunan	Ketua Pokja II
2.	Pengawas Mutu Hasil Pertanian	Anggota
3.	Pengendali Orgasme Pengganggu tanaman	Anggota
Kelompok Kerja III Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan		
1.	Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	Ketua Pokja III
2.	Pengawas Mutu Pakan	Anggota
3.	Medik Veteriner	Anggota
4.	Pengawas Bibit Ternak	Anggota
Kelompok Kerja IV Bidang Ketahanan Pangan		
1.	Kepala Bidang Ketahanan Pangan	Ketua Pokja IV
2.	Analisis Ketahanan Pangan	Anggota
3.	Pengawas Mutu Hasil Pertanian	Anggota
Kelompok Kerja V Bidang Penyuluh Pertanian		
1.	Kepala Bidang Penyuluh Pertanian	Ketua Pokja V
2.	Penyuluh Pertanian	Anggota
3.	Penyuluh Pertanian Kabupaten Wilayah I	Anggota
4.	Koordinator BPP Kecamatan	Anggota

XX. TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2024

NO.	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	Kepala Dinas	Ketua Tim
2	Sekretaris Dinas	Sekretaris
3	Kasubbag Keuangan	Anggota
4	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
5	Perencana Ahli Muda	Anggota
6	Arsiparis Pelaksana Lanjutan	Anggota
Kelompok Kerja I Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk		
7.	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Ketua Pokja I
8.	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
9.	Pengelola Data Pelayanan	Anggota
Kelompok Kerja II Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil		
10.	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	Ketua Pokja II
11.	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
12.	Operator SIAK	Anggota
13.	Pengelola Data Administrasi dan Verifikasi	Anggota

Kelompok Kerja III Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		
14.	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Ketua Pokja III
15.	Administrator Database Ahli Pertama	Anggota
16.	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota
17.	Pengelolaan SIAK	Anggota
18.	Operator SIAK	Anggota
Kelompok Kerja IV Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan		
19.	Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	Ketua Pokja IV
20.	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota

XXI. TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2024

NO	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	Kepala Dinas	Ketua Tim
2	Sekretaris Dinas	Sekretaris Tim
3	Analisis Keuangan Pusat Dan Daerah	Anggota
4	Kasubbag Umum Dan Kepegawaian	Anggota
5	Pengadministrasi Perencana dan Program	Anggota
Kelompok Kerja I Bidang Pemberdayaan Pemuda dan Kepramukaan		
6	Kabid Pemberdayaan Pemuda dan Kepramukaan	Ketua Pokja I
7	Analisis Kebijakan Bidang Pemberdayaan Pemuda dan Kepramukaan	Anggota
8	Analisis Kepemudaan	Anggota
Kelompok Kerja II Bidang Pengembangan Bakat Olahraga dan Prestasi		
9	Kepala Bidang Pengembangan Bakat Olahraga dan Prestasi	Ketua Pokja II
10	Analisis Kebijakan Bidang Pengembangan Bakat Olahraga dan Prestasi	Anggota
11	Pengawas Olahraga Bidang Pengembangan Bakat Olahraga dan Prestasi	Anggota
Kelompok Kerja III Bidang Pembudayaan Olahraga dan Pengembangan Saprasi		
12	Kabid Pembudayaan Olahraga dan Pengembangan Saprasi	Ketua Pokja III
13	Analisis Kebijakan Bidang Pembudayaan Olahraga dan Pengembangan Saprasi	Anggota
14	Analisis Olahraga Pembudayaan Olahraga dan Pengembangan Saprasi	Anggota

XXII. TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS PERPUSTAKAAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2024

NO.	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas	Ketua
2.	Sekretaris Dinas	Sekretaris
3.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
4.	Analisi Keuangan Pusat dan Daerah	Anggota
Kelompok Kerja I Bidang Kearsipan		
5.	Kepala Bidang Kearsipan	Ketua Pokja I
6.	Arsiparis	Anggota
Kelompok Kerja II Bidang Perpustakaan		
7.	Kepala Bidang Perpustakaan	Ketua Pokja II
8.	Pustakawan	Anggota

XXIII. TIM PENYUSUN RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2024

NO.	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	Kepala Dinas	Ketua
2	Sekretaris Dinas	Sekretaris
3	Kepala Sub Bagian Keuangan Perencanaan dan Pelaporan	Anggota
4	Kepala Sub Bag Umum dan Kepegawaian	Anggota
Kelompok Kerja I Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum		
3	Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Ketua Pokja I
4	Kasi Operasional Pengendalian dan Ketertiban Umum	Anggota
5.	Kasi Perlindungan Masyarakat	Anggota
Kelompok Kerja II Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah		
7.	Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah	Ketua Pokja II
8.	Kasi Operasional Penegakan Produk Hukum Daerah	Anggota
9.	Kasi Bimbingan dan Penyuluhan	Anggota

XXIV. TIM PENYUSUN RENCANA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2024

No	Jabatan Kedinasan	Jabatan Dalam Tim
1	Kepala Badan	Ketua Tim
2	Kasubbag TU	Sekretaris Tim
Kelompok Kerja I Seksi Idiologi Wawasan Ideologi wawasan, kebangsaan, ketahanan ekonomi, sosial budaya dan agama		
3	Kasubbid Idiologi Wawasan Ideologi wawasan, kebangsaan, ketahanan ekonomi, social budaya dan agama	Ketua Pokja I
4	Analisis Wawasan Kebangsaan	Anggota

Kelompok Kerja II Seksi Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan		
5	Kasubbid Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	Ketua Pokja II
6	Analisis Politik Dalam Negeri	Anggota
Kelompok Kerja III Seksi Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik		
7	Kasubbid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	Ketua Pokja III
8	Analisis Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	Anggota

XXV. TIM PENYUSUN RENCANA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2024

NO.	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala Pelaksana	Ketua
2.	Kepala Sekretariat	Sekretaris
Kelompok Kerja Seksi I Pencegahan dan Kesiapsiagaan		
3.	Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Ketua Pokja I
Kelompok Kerja Seksi II Kedaruratan dan Logistik		
4.	Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik	Ketua Pokja II
5.	Pranata Bencana	Anggota
6.	Pranata Pemadam Kebakaran	Anggota
Kelompok Kerja Seksi III Rehabilitasi dan Rekonstruksi		
7.	Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Ketua Pokja III
8.	Konselor	Anggota

XXVI. TIM PENYUSUN RENCANA KERJA KECAMATAN MANGGAR KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2024

NO.	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Camat	Ketua
2.	Sekretaris	Sekretaris
3.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
4.	Kasubbag Keuangan dan Perencanaan	Anggota
Kelompok Kerja Seksi I Pemerintahan		
1.	Kasi Pemerintahan	Ketua Pokja I
	Jabatan Struktural	Anggota
Kelompok Kerja Seksi II Ketentraman dan Ketertiban Umum		
2.	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Ketua Pokja II
	Jabatan Struktural	Anggota
Kelompok Kerja Seksi III Kesejahteraan Sosial		
3.	Kasi Kesejahteraan Sosial	Ketua Pokja III
	Jabatan Struktural	Anggota

NO.	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
Kelompok Kerja Seksi IV Pelayanan		
4.	Kasi Pelayanan	Ketua Pokja IV
	Jabatan Struktural	Anggota
Kelompok Kerja Seksi V Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat		
5.	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Ketua Pokja V
	Jabatan Struktural	Anggota

XXVII. TIM PENYUSUN RENCANA KERJA KECAMATAN GANTUNG KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2024

NO.	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Camat	Ketua
2.	Sekretaris	Sekretaris
3.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
4.	Kasubbag Keuangan dan Perencanaan	Anggota
Kelompok Kerja Seksi I Pemerintahan		
1.	Kasi Pemerintahan	Ketua Pokja I
	Jabatan Struktural	Anggota
Kelompok Kerja Seksi II Ketentraman dan Ketertiban Umum		
2.	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Ketua Pokja II
	Jabatan Struktural	Anggota
Kelompok Kerja Seksi III Kesejahteraan Sosial		
3.	Kasi Kesejahteraan Sosial	Ketua Pokja III
	Jabatan Struktural	Anggota
Kelompok Kerja Seksi IV Pelayanan		
4.	Kasi Pelayanan	Ketua Pokja IV
	Jabatan Struktural	Anggota
Kelompok Kerja Seksi V Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat		
5.	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Ketua Pokja V
	Jabatan Struktural	Anggota

XXVIII. TIM PENYUSUN RENCANA KERJA KECAMATAN KELAPA KAMPIT KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2024

NO.	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Camat	Ketua
2.	Sekretaris	Sekretaris
3.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
4.	Kasubbag Keuangan dan Perencanaan	Anggota

NO.	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
Kelompok Kerja Seksi I Pemerintahan		
1.	Kasi Pemerintahan	Ketua Pokja I
	Jabatan Struktural	Anggota
Kelompok Kerja Seksi II Ketentraman dan Ketertiban Umum		
2.	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Ketua Pokja II
	Jabatan Struktural	Anggota
Kelompok Kerja Seksi III Kesejahteraan Sosial		
3.	Kasi Kesejahteraan Sosial	Ketua Pokja III
	Jabatan Struktural	Anggota
Kelompok Kerja Seksi IV Pelayanan		
4.	Kasi Pelayanan	Ketua Pokja IV
	Jabatan Struktural	Anggota
Kelompok Kerja Seksi V Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat		
5.	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Ketua Pokja V
	Jabatan Struktural	Anggota

XXIX. TIM PENYUSUN RENCANA KERJA KECAMATAN DAMAR KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2024

NO.	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Camat	Ketua
2.	Sekretaris	Sekretaris
3.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
4.	Kasubbag Keuangan dan Perencanaan	Anggota
Kelompok Kerja Seksi I Pemerintahan		
1.	Kasi Pemerintahan	Ketua Pokja I
	Jabatan Struktural	Anggota
Kelompok Kerja Seksi II Ketentraman dan Ketertiban Umum		
2.	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Ketua Pokja II
	Jabatan Struktural	Anggota
Kelompok Kerja Seksi III Kesejahteraan Sosial		
3.	Kasi Kesejahteraan Sosial	Ketua Pokja III
	Jabatan Struktural	Anggota
Kelompok Kerja Seksi IV Pelayanan		
4.	Kasi Pelayanan	Ketua Pokja IV
	Jabatan Struktural	Anggota
Kelompok Kerja Seksi V Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat		
5.	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Ketua Pokja V
	Jabatan Struktural	Anggota

**XXX.TIM PENYUSUN RENCANA KERJA KECAMATAN SIMPANG RENGGIANG
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2024**

NO.	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Camat	Ketua
2.	Sekretaris	Sekretaris
3.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
4.	Kasubbag Keuangan dan Perencanaan	Anggota
Kelompok Kerja Seksi I Pemerintahan		
1.	Kasi Pemerintahan	Ketua Pokja I
	Jabatan Struktural	Anggota
Kelompok Kerja Seksi II Ketentraman dan Ketertiban Umum		
2.	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Ketua Pokja II
	Jabatan Struktural	Anggota
Kelompok Kerja Seksi III Kesejahteraan Sosial		
3.	Kasi Kesejahteraan Sosial	Ketua Pokja III
	Jabatan Struktural	Anggota
Kelompok Kerja Seksi IV Pelayanan		
4.	Kasi Pelayanan	Ketua Pokja IV
	Jabatan Struktural	Anggota
Kelompok Kerja Seksi V Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat		
5.	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Ketua Pokja V
	Jabatan Struktural	Anggota

**XXXI. TIM PENYUSUN RENCANA KERJA KECAMATAN SIMPANG PESAK
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2024**

NO.	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Camat	Ketua
2.	Sekretaris	Sekretaris
3.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
4.	Kasubbag Keuangan dan Perencanaan	Anggota
Kelompok Kerja Seksi I Pemerintahan		
1.	Kasi Pemerintahan	Ketua Pokja I
	Jabatan Struktural	Anggota
Kelompok Kerja Seksi II Ketentraman dan Ketertiban Umum		
2.	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Ketua Pokja II
	Jabatan Struktural	Anggota
Kelompok Kerja Seksi III Kesejahteraan Sosial		
3.	Kasi Kesejahteraan Sosial	Ketua Pokja III

NO.	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
	Jabatan Struktural	Anggota
Kelompok Kerja Seksi IV Pelayanan		
4.	Kasi Pelayanan	Ketua Pokja IV
	Jabatan Struktural	Anggota
Kelompok Kerja Seksi V Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat		
5.	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Ketua Pokja V
	Jabatan Struktural	Anggota

XXXII. TIM PENYUSUN RENCANA KERJA KECAMATAN DENDANG KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2024

NO.	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Camat	Ketua
2.	Sekretaris	Sekretaris
3.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
4.	Kasubbag Keuangan dan Perencanaan	Anggota
Kelompok Kerja Seksi I Pemerintahan		
1.	Kasi Pemerintahan	Ketua Pokja I
	Jabatan Struktural	Anggota
Kelompok Kerja Seksi II Ketentraman dan Ketertiban Umum		
2.	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Ketua Pokja II
	Jabatan Struktural	Anggota
Kelompok Kerja Seksi III Kesejahteraan Sosial		
3.	Kasi Kesejahteraan Sosial	Ketua Pokja III
	Jabatan Struktural	Anggota
Kelompok Kerja Seksi IV Pelayanan		
4.	Kasi Pelayanan	Ketua Pokja IV
	Jabatan Struktural	Anggota
Kelompok Kerja Seksi V Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat		
5.	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Ketua Pokja V
	Jabatan Struktural	Anggota

BUPATI BELITUNG TIMUR,


BURHANUDIN



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat dan karunia yang telah dilimpahkan kepada kita sekalian serta kemudahan, keterbukaan pikiran, dan kesehatan yang telah diberikan sehingga tugas-tugas pemerintahan dapat dilaksanakan dengan baik, khususnya selama penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitang Timur Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitang Timur Tahun 2024 ini disusun sebagai tindaklanjut dari keluarnya rancangan awal RKPD 2024 Kabupaten Belitang Timur yang telah disampaikan kepada setiap Perangkat Daerah melalui surat edaran kepala daerah dimana sebelumnya telah dilaksanakan musrenbang di tingkat kecamatan.

Dalam menyajikan dokumen Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitang Timur Tahun 2024 ini disadari bahwa masih terdapat keterbatasan dan faktor-faktor kelemahan yang mempengaruhi kemampuan untuk menyajikan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitang Timur Tahun Anggaran 2024 secara lebih optimal. Namun tentunya harapan kami, semoga Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitang Timur Tahun 2024 ini dapat dijadikan barometer dan tolak ukur untuk perbaikan kinerja pada tahun berikutnya, sehingga dapat diambil langkah-langkah melalui transformasi dari proses perencanaan yang strategis dalam pengambilan keputusan untuk kemajuan bersama.

Semoga Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitang Timur Tahun 2024 ini memberi kontribusi dan dapat berguna bagi kemajuan Kabupaten Belitang Timur.

Manggar, April 2023

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
Kabupaten Belitang Timur,



RONNY SETIAWAN, S. IP, M.PA
Pembina Utama Muda

NIP. 19751023 200112 1 005



DAFTAR ISI

	Halaman
Kata pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	I - 1
1.2 Landasan Hukum	I - 2
1.3 Maksud dan Tujuan	I - 6
1.4 Sistematika Penulisan	I - 7
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	II - 1
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II - 21
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	II - 26
2.4 Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD	II - 27
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	II - 43
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	III - 1
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	III - 17
3.3 Program dan Kegiatan	III - 29
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	IV - 1
BAB V PENUTUP	
5.1 Catatan Penting	V - 1
5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan	V - 1
5.3 Rencana Tindak Lanjut	V - 2
Lampiran	
- Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja	



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2022	II - 3
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II - 22
Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024	II - 28
Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan	II - 43
Tabel 3.1 Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Tahun 2024	III - 13
Tabel 3.2 Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja	III - 19



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dokumen Renja yang disusun setiap tahunnya memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap OPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) OPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra OPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja OPD. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Timur sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2024 ini menyusun Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Timur tahun 2024. Renja OPD merupakan dokumen rencana pembangunan OPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh OPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, RKPD merupakan pedoman untuk menyempurnakan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) dalam rangka mempersiapkan Rencana Kerja Anggaran (RKA-PD) Tahun 2024. Mengingat RKPD merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, maka RKPD merujuk pada dokumen-dokumen perencanaan yang sudah ada. Dalam prosesnya penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan Renja Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan akhir RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan



program prioritas rancangan akhir RKPD yang disusun ke dalam rancangan Renja Perangkat Daerah, yang selaras dengan Renstra Perangkat Daerah. Prinsip-prinsip di dalam penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu pada rancangan awal RKPD;
- b. Rumusan program/kegiatan di dalam renja Perangkat Daerah didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing Perangkat Daerah;
- c. Penyusunan Renja Perangkat Daerah bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;
- d. Rumusan program/kegiatan di dalam renja Perangkat Daerah didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif Perangkat Daerah;
- e. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun $n+1$.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Landasan Hukum yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4833);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5103);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);



18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31);
25. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
26. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
27. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
28. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
29. Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);



32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1312, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1312);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447), sebagaimana telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
41. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rancangan Kerja Pemerintah Tahun 2023;
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
43. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 10 Seri E);



44. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 Nomor 11 Seri E).
45. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 85);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 17);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 18);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Timur 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 19);
49. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 Nomor 2).
50. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pegasutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Tambah Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 17).
51. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan dokumen Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 adalah sebagai salah satu upaya dalam rangka pencapaian Visi, Misi dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2026. Dokumen ini akan menjadi dokumen perencanaan OPD yang diacu untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Beltim dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2024.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 adalah merumuskan program dan kegiatan pembangunan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selama tahun 2024, dan sebagai tolak ukur sampai sejauh mana tingkat pencapaian sasaran program atau kegiatan yang ditetapkan pada tahun sebelumnya.



1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitong Timur Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja OPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab–bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja PD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing PD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai: Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD, Tantangan dan peluang serta Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Akhir RKP

Berisikan uraian mengenai Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan akhir RKP dengan hasil analisis kebutuhan, penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan, penjelasan temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan akhir RKP, misalnya terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan akhir RKP, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda.



2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berisikan uraian mengenai Proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh, kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai: faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisikan rencana kerja dan pendanaan untuk tahun 2024.

BAB V PENUTUP

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PD

Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses evaluasi. Dengan evaluasi dapat teridentifikasi dua hal yaitu sejauh mana proses perencanaan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan untuk mengetahui permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan tersebut. Hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang.

Pada Tahun Anggaran 2021 Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung Timur melaksanakan 17 (tujuh belas) program, 29 (dua puluh Sembilan) Kegiatan dan 79 (Tujuh Puluh Sembilan) Sub kegiatan.

Total Anggaran Belanja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2021 sebesar Rp **12.523.421.025,-**, dengan Total Realisasi Anggaran sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp **10.861.847.083,-** atau sebesar **86,73 %**.

Secara global Target kinerja Keuangan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung Timur dengan Belanja Langsung terdiri 13 Program, 22 Kegiatan dan 62 Sub Kegiatan dengan tingkat penyerapan anggaran hingga **86,73%** dari total anggaran sebesar Rp **12.523.421.025,-** capaian realisasi sebesar Rp **10.861.847.083,-**. Total Capaian Kinerja dari Seluruh Program Dengan Predikat Kinerja dari seluruh Program dengan Kriteria Penilaian Realisasi Anggaran dari seluruh Program **“Tinggi” (86,73%)** dan Realisasi Kinerja dengan Kriteria Tinggi **(89,33%)** diantara **76% ≤ 90%**.

Pada Tahun Anggaran 2022 Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung Timur melaksanakan 15 (lima belas) program, 28 (dua puluh delapan) Kegiatan dan 65 (Enam Puluh Lima) Sub kegiatan dengan total Anggaran sebesar Rp **14.886.932.363,-** yang terdiri dari Belanja Operasi. Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai Sebesar Rp 4.804.731.818,- Belanja Barang dan Jasa Rp 9.816.800.545,- Belanja Bantuan Sosial Rp 265.400.000.

Realisasi anggaran Belanja DSPMD Kabupaten Belitung Timur tahun 2022 secara keseluruhan sampai dengan Triwulan ke IV sebesar Rp **13.426.034.564,- (90,19%)** dari total anggaran Rp **14.886.932.363,-**. Adapun capaian kinerja sampai dengan Triwulan IV (capaian outcome program dan output kegiatan) pada angka **96,66%**, berarti realisasi kinerja diatas interval $91\% \leq 100\%$ dengan kriteria penilaian kinerja **“Sangat Tinggi”**, hal ini disebabkan semua program, Kegiatan dan Sub Kegiatan hampir semua terealisasi dalam pelaksanaannya sampai dengan Triwulan IV.



Berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi Renja Sampai dengan Triwulan IV Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitang Timur, untuk urusan wajib bidang Sosial, dan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak secara periodik realisasi kinerja dalam rangka target capaian kinerja Renstra sampai dengan akhir periode Renstra Tahun 2022 sudah sesuai pendekatan *money follow function* artinya fungsi-fungsi yang berada pada masing-masing unit/satuan kerja di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitang Timur sudah dilaksanakan sesuai dengan alokasi anggaran yang ada. Meskipun program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara wajar, capaian target kinerja Renstra sampai dengan akhir periode Renstra Tahun 2022 baik upaya perencanaan dan penganggaran sudah dilaksanakan dengan lebih efektif dan efisien.



**RENCANA KERJA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BELITONG TIMUR
TAHUN 2024**

Tabel 2.1

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Belitong Timur**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) n-1	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
Semua Bidang										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan dan Aset yang disusun sesuai standar (Persen)	100.00	100.00	100	100	100%	100.00	300.00	300%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan (Orang)	46.00	37.00	34	31	91%	46.00	114.00	248%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang berkinerja baik (Persen)	100.00	100.00	100	100	100%	100.00	300.00	300%
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terpenuhinya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya dan Pakaian Kerja Lapangan (bulan)	33.00	12.00	0	-	0%	33.00	45.00	136%
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Pemenuhan Sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah (Persen)	10.00	0.00	1	1	100%	10.00	11.00	110%
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah sarana dan prasana disiplin pegawai yang tersedia (Set)	80.00	0.00	0	-	0%	80.00	80.00	100%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah (Persen)	100.00	100.00	100	100	100%	100.00	300.00	300%



RENCANA KERJA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BELITONG TIMUR
TAHUN 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun berjalan) n-1	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor (Jenis)	18.00	12.00	18	18	100%	18.00	48.00	267%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan Perlengkapan kantor yang diadakan (Jenis)	32.00	12.00	30	30	100%	32.00	74.00	231%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia (Jenis)	7.00	12.00	5	5	100%	7.00	24.00	343%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang Tersedia (Jenis)	22.00	12.00	20	20	100%	22.00	54.00	245%
		tersedianya jasa administrasi peralatan/ perlengkapan kantor dan rumah tangga (bulan)	0.00	12.00	12	12	100%	0.00	24.00	#DIV/0!
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia (Jenis)	7.00	12.00	5	5	100%	7.00	24.00	343%
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.00	0.00	0	-	0%	10.00	10.00	100%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah yang dilaksanakan (Kali)	45.00	12.00	4	4	100%	45.00	61.00	136%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase paket pengadaan barang & jasa yang dilaksanakan sesuai SOP (Persen)	80.00	80.00	80	80	100%	80.00	240.00	300%
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang tersedia (Unit)	1.00	12.00	0	-	0%	1.00	13.00	1300%
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3.00	12.00	0	-	0%	3.00	15.00	500%
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	72.00	12.00	0	-	0%	72.00	84.00	117%



**RENCANA KERJA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BELITONG TIMUR
TAHUN 2024**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun berjalan (tahun 2023) n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	19.00	12.00	0	-	0%	19.00	31.00	163%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan Jasa Penunjang Kantor (Persen)	100.00	100.00	100	100	100%	100.00	300.00	300%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.00	12.00	3	3	100%	12.00	27.00	225%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12.00	12.00	6	6	100%	12.00	30.00	250%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12.00	12.00	8	8	100%	12.00	32.00	267%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik (Persen)	80.00	80.00	80	80	100%	80.00	240.00	300%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1.00	12.00	0	-	0%	1.00	13.00	1300%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	22.00	12.00	17	17	100%	22.00	51.00	232%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12.00	12.00	2	2	100%	12.00	26.00	217%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	tersedianya perlengkapan gedung kantor (bulan)	16.00	12.00	0	-	0%	16.00	28.00	175%



**RENCANA KERJA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BELITONG TIMUR
TAHUN 2024**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) n-1	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							0.00		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		100.00					100.00	100.00	100%
	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyaluran uang atau barang hasil pengumpulan kepada masyarakat yang membutuhkan (%)	100.00	0.00	0	0	0%	100.00	100.00	100%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	2.00	0.00	0	-	0%	2.00	2.00	0%
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	persentase potensi sumber kesejahteraan sosial yang diberdayakan (%)	100.00	100.00	100	100	100%	100.00	300.00	300%
	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	40.00	76.00	40	40	100%	40.00	156.00	390%
	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	7.00	12.00	7	7	100%	7.00	26.00	371%
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	0.00	0.00	65	65	100%	0.00	65.00	#DIV/0!
		terlaksananya upaya-upaya peningkatan kualitas SDM PSM baru, wksbm dan karang taruna (kegiatan)	0.00	1.00	0	-	0%	0.00	1.00	0%



**RENCANA KERJA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BELITONG TIMUR
TAHUN 2024**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) n-1	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		tersedianya PSM dan TKSK yang terampil di Desa, kecamatan dan kabupaten dalam menjangring permasalahan sosial di masyarakat (PSM)	0.00	39.00	0	-	0%	0.00	39.00	0%
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	48.00	1.00	0	-	0%	48.00	49.00	102%
		terlaksananya upaya-upaya peningkatan kualitas SDM PSM baru, wksbm dan karang taruna (kegiatan)	0.00	1.00	0	-	0%	0.00	1.00	#DIV/0!
		tersedianya PSM dan TKSK yang terampil di Desa, kecamatan dan kabupaten dalam menjangring permasalahan sosial di masyarakat (psm)	0.00	39.00	0	-	0%	0.00	39.00	#DIV/0!
	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/ Kota	50.00	0	0	-	0%	50.00	50	100%
		Jumlah Antisipasi penanganan permasalahan/ kasus psikososial keluarga (Kasus)	0.00	30.00	34	34	100%	0.00	64.00	#DIV/0!
		jumlah antisipasi (1 kegiatan)	0.00	1.00	0	-	0%	0.00	1.00	#DIV/0!
	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN							0.00	0.00	#DIV/0!



RENCANA KERJA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BELITONG TIMUR
TAHUN 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) n-1	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	"Terlaksananya Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal" (%)	100.00	0.00	0	0	0%	100.00	100.00	100%
	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal		0.00	0.00	0	-	0.00%	0.00	0.00	#DIV/0!
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		100.00					100.00	100.00	100%
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti Sosial" (%)	100.00	100.00	100	100	100%	100.00	300.00	300%
	Penyediaan Permakanan	angka lanjut usia terlantar (lansia)	0.00	100.00	0	-	0%	0.00	100.00	#DIV/0!
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	250.00	0.00	0	0	0	250.00	250.00	100%
	Penyediaan Sandang	angka lanjut usia terlantar (lansia)	0.00	50.00	0	-	0%	0.00	50.00	#DIV/0!



RENCANA KERJA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BELITONG TIMUR
TAHUN 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun berjalan (tahun 2023) n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/ Kota	250.00	100.00	50	50	100%	250.00	400.00	160%
	Penyediaan Alat Bantu	Tersedianya Alat Bantu (Paket)	0.00	20.00	0	-	0%	0.00	20.00	#DIV/0!
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	60.00	0.00	14	14	100%	60.00	74.00	123%
		angka lanjut usia terlantar terpenuhnya kebutuhan dasar lanjut usia terlantar diluar panti (lansia)	0.00	110.00	0	-	0%	0.00	110.00	#DIV/0!
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	350.00	0.00	20	20	100%	350.00	370.00	106%
		angka lanjut usia terlantar (lansia)	0.00	500.00	0	-	0%	0.00	500.00	#DIV/0!
		angka lanjut usia potensial terpenuhnya kebutuhan dasar lanjut usia terlantar di luar panti (UEF)	0.00	4.00	0	-	0%	0.00	4.00	#DIV/0!
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	0.00	0.00	7	7	100%	0.00	7.00	#DIV/0!
		terlaksananya pelayanan dan perlindungan sosial terpenuhnya kebutuhan dasar lanjut usia terlantar di luar panti (%)	0.00	200.00	0	-	0%	0.00	200.00	#DIV/0!



RENCANA KERJA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BELITONG TIMUR
TAHUN 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun berjalan 2023) n-1	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah anak/siswa penerima PMTAS terpenuhnya kebutuhan dasar anak terlantar di luar panti (350 siswa)	0.00	350.00	0	-	0%	0.00	350.00	#DIV/0!
		terpenuhnya kebutuhan dasar anak terlantar di luar panti (%)	0.00	100.00	0	-	0%	0.00	100.00	#DIV/0!
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti Sosial" (%)	100.00	100.00	100	100	100%	100.00	300.00	300%
	Penyediaan Permakanan	terselenggaranya pembinaan dan pendampingan keluarga eks psikotik luar panti dan home visit (%)	0.00	100.00	0	-	0%	0.00	100.00	#DIV/0!
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial bagi PMKS	0.00	100.00	7	7	100%	0.00	107.00	#DIV/0!
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, mental, spiritual, dan sosial kepada keluarga (Kecamatan)	0.00	7.00	0	-	0%	0.00	7.00	#DIV/0!
		terselenggaranya penyuluhan napza dan pendamping eks napza (peserta)	0.00	0.00	0	0	0%	0.00	0.00	#DIV/0!
	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	terlaksananya pelayanan terpadu kepada masyarakat (%)	0.00	0.00	100	0	0%	0.00	0.00	#DIV/0!
	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	jumlah posyandu yang di bina (posyandu)	0.00	134.00	0	-	0%	0.00	134.00	#DIV/0!
		terlaksananya pelayanan terpadu kepada masyarakat (orang)	0.00	100.00	0	-	0%	0.00	100.00	#DIV/0!
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	terlaksananya pengiriman bagi korban Napza, ABH, dan PMKS lainnya (%)	15.00	100.00	3	3	100%	15.00	118.00	787%



RENCANA KERJA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BELITONG TIMUR
TAHUN 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun berjalan) n-1	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pemberian Layanan Rujukan	terlaksananya pelayanan terpadu kepada masyarakat terselenggaranya pembinaan dan pendampingan keluarga eks psikotik luar panti dan home visit (%)	7.00	100.00	3	3	100%	7.00	110.00	1571%
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		100.00					100.00	100.00	100%
	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Persentase Anak Terlantar yang mendapatkan jaminan sosial selama satu tahun (%)	100.00	100.00	100	100	100%	100.00	300.00	300%
	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Penjangkauan anak-anak terlantar yang dilaksanakan (Kali)	0.00	100.00	24	-	0%	0.00	100.00	#DIV/0!
	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Terlaksananya Rujukan Anak- anak Terlantar (Orang)	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	#DIV/0!
		terlaksananya pelayanan dan perlindungan sosial, bagi anak terlantar, anak yang membutuhkan perlindungan khusus dan anak nakal (%)	0.00	35.00	0	-	0%	0.00	35.00	#DIV/0!
	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/ Kota	14.00	100.00	14	14	100%	14.00	128.00	914%
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah fakir miskin yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial (%)	100.00	100.00	100	100	100%	100.00	300.00	300%
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	44173.00	1.00	2	2	100%	44173.00	44176.00	100%
		jumlah keluarga sasaran yang memperoleh penguatan kapasitas dan pendamping meningkatnya aparatur penyedia layanan program penanggulangan kemiskinan (bulan)	0.00	12.00	0	-	0%	0.00	12.00	#DIV/0!



RENCANA KERJA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BELITONG TIMUR
TAHUN 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun berjalan (tahun 2023) n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Aplikasi (Aplikasi)	1.00	0.00	0	0	0%	1.00	1.00	100%
		meningkatnya aparatur penyedia layanan program penanggulangan kemiskinan (%)	0.00	100.00	100	100	100%	0.00	200.00	#DIV/0!
		Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	24178.00	12.00	1	1	100%	24178.00	24191.00	100%
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Tersedianya anggaran bantuan sosial kesejahteraan Keluarga (Orang)	0.00	0.00	0	0	0%	0.00	0.00	#DIV/0!
		Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	22.00	23.00	22	19	86%	22.00	64.00	291%
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA							0.00	0.00	#DIV/0!
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Perlindungan sosial Bencana Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota" (%)	100.00	100.00	100	100	100%	100.00	300.00	300%
	Penyediaan Sandang	Tersedianya Buffer stock Sandang bagi korban Bencana (Paket)	0.00	0.00	0	0	0%	0.00	0.00	#DIV/0!
		persentase korban bencana dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan tanggap darurat bencana daerah kabupaten (%)	0.00	0.00	0	-	0%	0.00	0.00	#DIV/0!
	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Tersedianya Kebutuhan dasar bagi kelompok Rentan (Kelompok)	0.00	0.00	0	0	0%	0.00	0.00	#DIV/0!
		persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan tanggap darurat bencana (%)	0.00	0.00	0	-	0%	0.00	0.00	#DIV/0!



RENCANA KERJA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BELITONG TIMUR
TAHUN 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun berjalan (tahun 2023) n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Tersedianya Kebutuhan dasar bagi kelompok Rentan (Paket)	70.00	100.00	70	70	100%	70.00	240.00	343%
	Pelayanan Dukungan Psikososial	Tersedianya Pelayanan dan dukungan Psikososial (Orang)	0.00	0.00	0	-	0%	0.00	0.00	#DIV/0!
		persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan tanggap darurat bencana (%)	0.00	0.00	0	-	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota" (%)	100.00	100.00	100	100	100%	100.00	300.00	300%
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	jumlah pengurus kampung siaga bencana (KSB) (pengurus)	0.00	0.00	0	-	0%	0.00	0.00	#DIV/0!
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Terselenggaranya operasional pelayanan dan penanggulangan bencana Kabupaten (Orang)		0.00	0	-	0%	0.00	0.00	#DIV/0!
		terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman bencana (bulan)	0.00	12.00	0	-	0%	0.00	12.00	#DIV/0!
		angka kejadian bencana sosial yang telah terjadi dan potensi yang akan datang jumlah kesiapsiagaan team satgas (orang)	0.00	70.00	0	-	0%	0.00	70.00	#DIV/0!
		Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	71.00	70.00	70	69	99%	71.00	210.00	296%
		jumlah sarana prasarana yang memadai (%)	0.00	100.00	0	-	0%	0.00	100.00	#DIV/0!



**RENCANA KERJA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BELITONG TIMUR
TAHUN 2024**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun berjalan) n-1	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN		0.00					0.00	0.00	#DIV/0!
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota" (Taman Makam Nasional)	0.00	12.00	12	12	100%	0.00	24.00	#DIV/0!
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil IRehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	0.00	1.00	1	1	100%	0.00	2.00	#DIV/0!
		terpeliharanya sarana dan prasarana taman makam pahlawan (bulan)	0.00	12.00	12	12	100%	0.00	24.00	#DIV/0!
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								0.00		
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		80.00					80.00	80.00	100%
	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota (OPD)	100.00	32.00	32	32	100%	100.00	164.00	164%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	terlaksananya koordinasinya dan sinkronisasi terkait pelaksanaan PUG (OPD)	50.00	32.00	32	32	100%	50.00	114.00	228%
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	0.00	3.00	1	1	100%	0.00	4.00	#DIV/0!



RENCANA KERJA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BELITONG TIMUR
TAHUN 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun berjalan (tahun 2023) n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	32.00	0.00	4	4	0%	32.00	36.00	113%
		jumlah peserta pendidik dan pelatihan gender (peserta)	0.00	50.00	0	-	0%	0.00	50.00	#DIV/0!
	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	0.00	0.00	32	32	100%	0.00	32.00	#DIV/0!
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	"Terlaksananya Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota" (Hari Besar perempuan)	100.00	2.00	2	2	100%	100.00	104.00	104%
	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	tersosialisasinya aturan dan kebijakan yang berkaitan dengan peran perempuan (jumlah peserta perempuan) (Kegiatan Hari Besar Perempuan)	0.00	2.00	2	2	100%	0.00	4.00	#DIV/0!
		jumlah desa prima percontohan (desa)	0.00	1.00	0	-	0%	0.00	1.00	#DIV/0!
		jumlah kegiatan hari besar (kegiatan)	0.00	2.00	0	-	0%	0.00	2.00	#DIV/0!
		jumlah organisasi perempuan yang di bina (organisasi)	0.00	3.00	0	-	0%	0.00	3.00	#DIV/0!



RENCANA KERJA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BELITONG TIMUR
TAHUN 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun berjalan 2023) n-1	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	jumlah peserta pelatihan (peserta)	0.00	50.00	0	-	0%	0.00	50.00	#DIV/0!
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Rapat Koordinasi Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota (Persen)	0.00	0.00	100	100	100%	0.00	100.00	#DIV/0!
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah IR yang dibina (IR)	0.00	0.00	50	50	100%	0.00	50.00	#DIV/0!
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		100.00					100.00	100.00	100%
	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rapat Koordinasi Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota (Persen)	0.00	0.00	100	100	100%	0.00	100.00	#DIV/0!
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	0.00	0.00	7	7	100%	0.00	7.00	#DIV/0!
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Rujukan bagi Perempuan Korban Kekerasan (Layanan)	5.00	5.00	5	5	100%	5.00	15.00	300%



RENCANA KERJA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BELITONG TIMUR
TAHUN 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) n-1	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota (Layanan)	0.00	0.00	30	30	100%	0.00	30.00	#DIV/0!
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	10.00	0.00	0	-	0%	10.00	10.00	100%
		jumlah penanganan perempuan dan anak korban kekerasan (%)	0.00	100.00	0	-	0%	0.00	100.00	#DIV/0!
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota (Persen)	100.00		100	100	100%	100.00	200.00	200%
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelatihan terkait penyedia layanan bagi perempuan korban kekerasan (Pelatihan/Kegiatan)	0.00	100.00	2	2	100%	0.00	102.00	#DIV/0!
		jumlah tenaga terlatih untuk korban pendamping KDRT (orang)	0	12.00	0	-	0%	0.00	12	#DIV/0!
	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah perempuan penerima bantuan (Perempuan)	0.00	0.00	50	50	100%	0.00	50.00	#DIV/0!
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA		50.00					50.00	50.00	100%



RENCANA KERJA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BELITONG TIMUR
TAHUN 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun berjalan 2023) n-1	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100.00		0	-	-	100.00	100.00	100%
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		50.00		0	-	-	50.00	50.00	100%
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		1.00					1.00	1.00	100%
	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen data gender yang tersedia (Dokumen)	0.00	0.00	0	-	-	0.00	0.00	#DIV/0!
	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	tersedianya dokumen indeks ketahanan keluarga (siswa magang dan UEF)	0.00	0.00	0	-	-	0.00	0.00	#DIV/0!
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		100.00					100.00	100.00	100%
	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kabupaten Layak Anak (Desa)	1.00	1.00	1	1	100%	1.00	3.00	300%
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan	Terbentuk dan Terbinanya Kepengurusan Forum Anak Desa (Kepengurusan)	0.00	1.00	5	5	100%	0.00	6.00	#DIV/0!
		jumlah kecamatan/desa layak anak (desa)	0.00	39.00	0	-	0%	0.00	39.00	#DIV/0!



RENCANA KERJA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BELITONG TIMUR
TAHUN 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun berjalan (tahun 2023) n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Kabupaten/Kota									
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1.00	0.00	0	-	0%	1.00	1.00	100%
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		100.00					100.00	100.00	100%
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota (Persen)	0.00	0.00	100	100	100%	0.00	100.00	#DIV/0!
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	0.00	0.00	7	7	100%	0.00	7.00	#DIV/0!
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	"Tersedianya Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota" (Layanan)	100.00	0.00	0	-	0%	100.00	100.00	100%
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	10.00	0.00	1	1	100%	10.00	11.00	110%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota (Layanan)	0.00	0.00	30	30	100%	0.00	30.00	#DIV/0!



**RENCANA KERJA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BELITUNG TIMUR
TAHUN 2024**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) n-1	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Rakor)	100.00	9.00	100	100	100%	100.00	209.00	209%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi yang dilaksanakan terkait sarpras pelayanan anak (Kali)	1.00	0.00	2	2	100%	1.00	3.00	300%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah penanganan perempuan dan anak korban kekerasan (%)	0.00	71.00	2	2	100%	0.00	73.00	#DIV/0!



2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Analisa kinerja pelayanan berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai target indikator sasaran dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan serta untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan. Untuk menganalisis kinerja pelayanan atau tingkat capaian kinerja sasaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitang Timur, digunakan beberapa indikator antara lain :

1. Indeks Kepuasan Layanan Penunjang;
2. Nilai AKIP Perangkat Daerah;
3. Persentase Pengelolaan sistem Data Gender dan anak yang tersedia;
4. Persentase potensi sumber kesejahteraan sosial yang diberdayakan;
5. PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar;
6. Anugrah Parahita Ekapraya;
7. Kabupaten Layak Anak.

Hasil analisis sesuai yang tertuang dalam Laporan Kinerja Tahun 2022 telah menunjukkan sudah mencapai target yang ditetapkan tahun 2022, hal ini menunjukkan bahwa tingkat pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitang Timur sudah baik. Jika dilihat kinerja Fisik dan keuangan sampai dengan Triwulan IV sesuai dengan laporan Monev Renja triwulan IV tahun 2022 hasilnya, adalah sebagai berikut :

a. Kinerja Fisik.

Target fisik Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitang Timur adalah sebesar 100 % sedangkan realisasi yang dicapai sampai dengan akhir triwulan IV tahun 2022 adalah sebesar 96,66%, sehingga sesuai interval nilai realisasi kinerja fisik diatas angka 91% dengan Sangat Tinggi

b. Kinerja Keuangan.

Target dan realisasi keuangan pada belanja langsung sampai dengan akhir triwulan IV tahun 2022 dapat diinformasikan bahwa target keuangan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitang Timur adalah sebesar Rp. 14.886.932.363,- sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp. 13.426.034.564,- atau 90,19%.

Disamping itu, berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi DSPMD Kab. Belitang Timur tersebut, maka Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ditetapkan beberapa indikator kinerja yang disinergikan dan diharmonisasikan dengan indikator IKK, SPM, berdasarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran pada Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang diyakini dapat mencerminkan keberhasilan OPD dalam melaksanakan kinerjanya sesuai dengan Tugas, Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitang Timur sebagai organisasi yang melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan yang menjadi kewenangan daerah di bidang sosial, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.



**RENCANA KERJA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BELITONG TIMUR
TAHUN 2024**

Adapun Tabel Analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah sebagai berikut :

**Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Belitong Timur**

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD		SPM	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2020	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2024	
1		2	3	5	6	7	11	9	10	11	11	12
Indikator Kinerja 2016-2021												
Urusan Penunjang												
1	Persentase ketersediaan administrasi perkantoran, dan perjalanan dinas luar daerah		√	100	100	-	-	-	-	-	-	
2	Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan pemeliharaan kantor		√	100	100	-	-	-	-	-	-	
3	Persentase keikutsertaan pegawai dalam diklat/bimtek peraturan perundang-undangan		√	100	100	-	-	-	-	-	-	
4	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai		√	100	100	-	-	-	-	-	-	
5	Nilai Sakip		√	B	B	-	-	-	-	-	-	
Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial												
6	Persentase PMKS skala kab/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar		√	50	50	-	-	-	-	-	-	
7	Persentase PMKS skala kab/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi lainnya		√	15	15	-	-	-	-	-	-	



RENCANA KERJA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BELITONG TIMUR
TAHUN 2024

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD		SPM	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2020	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2024	
1		2	3	5	6	7	11	9	10	11	11	12
8	Persentase Panti Sosial skala kab/kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial		√	0	0	-	-	-	-	-	-	
9	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial		√	100	100	-	-	-	-	-	-	
10	Persentase korban bencana skala Kabupaten/Kota yang menerima bantuan social selama tanggap darurat		√	100	100	-	-	-	-	-	-	
11	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang menerima jaminan sosial		√	18	18	-	-	-	-	-	-	
12	Persentase peningkatan akses, kemudahan dan jangkauan rumah tangga miskin		√	100	100	-	-	-	-	-	-	
13	Persentase penigkatan kapasitas dan kesejahteraan keluarga sasaran		√	100	100	-	-	-	-	-	-	
14	Persentase penyandang disabilitas terlantar untuk jenis pelayanan dasar rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar luar panti dalam kurun waktu satu tahun (SPM)	√		100	100	-	-	-	-	-	-	
15	Persentase anak terlantar untuk jenis pelayanan dasar rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti dalam kurun waktu satu tahun (SPM)	√		100	100	-	-	-	-	-	-	
16	Persentase lanjut usia terlantar untuk jenis pelayanan dasar rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti dalam kurun waktu satu tahun (SPM)	√		100	100	-	-	-	-	-	-	



**RENCANA KERJA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BELITONG TIMUR
TAHUN 2024**

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD		SPM	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2020	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2024	
1		2	3	5	6	7	11	9	10	11	11	12
17	Persentase korban bencana kabupaten / kota untuk jenis pelayanan dasar perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota (SPM)	√		100	100	-	-	-	-	-	-	
18	Persentase masyarakat miskin yang mendapatkan jaminan sosial		√	82	90.8	-	-	-	-	-	-	
Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak												
19	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan		√	37	37	-	-	-	-	-	-	
20	Partisipasi perempuan di lembaga swasta		√	48	48	-	-	-	-	-	-	
21	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan		√	90	90	-	-	-	-	-	-	
22	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah		√	54	54	-	-	-	-	-	-	
23	Rasio KDRT		√	0.819	0.819	-	-	-	-	-	-	
24	Indeks Ketahanan Keluarga		√	Tinggi	Tinggi	-	-	-	-	-	-	
Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa												
25	PKK Aktif		√	47	47	-	-	-	-	-	-	
26	Posyandu Aktif		√	133	133	-	-	-	-	-	-	
27	Profil Desa Sesuai Standar		√	39	39	-	-	-	-	-	-	
28	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)		√	4	4	-	-	-	-	-	-	
29	Persentase Aparatur Desa yang meningkat kapasitasnya		√	100	100	-	-	-	-	-	-	
30	Persentase penyusunan dan Pengelolaan keuangan desa yang terfasilitasi		√	100	100	-	-	-	-	-	-	



**RENCANA KERJA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BELITONG TIMUR
TAHUN 2024**

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD		SPM	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2020	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2024	
1		2	3	5	6	7	11	9	10	11	11	12
31	Desa yang menyusun RKPDes pertahun		√	39	39	-	-	-	-	-	-	
32	Posyantek Aktif		√	4	4	-	-	-	-	-	-	
33	Persentase Badan Usaha Milik Desa Yang Terbentuk		√	39	39	-	-	-	-	-	-	
Indikator Kinerja 2021-2026												
Urusan Penunjang												
1	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang		√	-	88,31 - 100 : A	88,31 - 100 : A	A	A	A	A	A	
2	Nilai AKIP Perangkat Daerah		√	-	BB > 70- 80	B >60-70	67,77	62,77	67,77	67,77	67,77	
Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial												
3	Persentase potensi sumber kesejahteraan sosial yang diberdayakan		√	-	100	100	100	100	100	100	100	
4	PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	√	√	-	96,58	96,58	97,00	95,29	58,00	97,00	97,00	
Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak												
5	Anugrah Parahita Ekapraya		√	-	-	Pratama	Madya	Pratama	Pratama	Madya	Madya	
6	Kabupaten Layak Anak		√	-	-	Pratama	Madya	Pratama	Madya	Madya	Madya	
7	Persentase Pengelolaan sistem Data Gender dan anak yang tersedia		√			100	100	NA	100	100	100	



2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PD

Isu strategis dalam pelaksanaan tupoksi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitang Timur berdasarkan analisis dari berbagai sumber, Beberapa permasalahan yang perlu ditangani pada tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Permasalahan Pokok

a. Permasalahan Bidang Sosial

1. Belum optimalnya pelayanan rehabilitasi dasar bagi penyandang disabilitas telantar, lanjut usia telantar, anak telantar di luar panti, dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti;
2. Kurangnya partisipasi masyarakat, Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan dunia usaha dalam pelayanan masalah kesejahteraan sosial;
3. Kurangnya kapabilitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam menghadapi masalah sosial;
4. Sarana dan prasarana operasional belum memadai;
5. Rendahnya kualitas pemadanan data penerima manfaat program penanggulangan kemiskinan/keluarga sasaran antara yang ditetapkan oleh Pudatin Kementerian Sosial Republik Indonesia dengan usulan yang disampaikan oleh Kepala Daerah.

b. Permasalahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak :

1. Kelembagaan yang memfasilitasi pelayanan PPPA masih minim dan pemberdayaan masyarakat terhadap penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak belum maksimal;
2. Belum maksimalnya penerapan anggaran responsive gender untuk mendorong pelaksanaan PUG;
3. Belum adanya kebijakan di tingkat desa terkait dengan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak serta perempuan.

Isu-isu Strategis yang berkaitan dengan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :

2. Isu Strategis

❖ Bidang Sosial

Isu strategis bidang sosial diurutkan sebagai berikut :

1. Peningkatan pelayanan dan rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang disabilitas telantar, lanjut usia telantar, anak telantar di luar panti, dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti;
2. Peningkatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam menghadapi masalah sosial;
3. Pemberian bantuan sosial yang belum tepat sasaran;
4. pelayanan rehabilitasi sosial dasar, perlindungan dan jaminan sosial bagi anak terlantar, anak yang berhadapan dengan hukum;
5. Peningkatan pelayanan rehabilitasi sosial dan pendayagunaan, serta jaminan sosial bagi tuna sosial;



6. Peningkatan sumber daya manusia dalam pelayanan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota;
7. Belum optimalnya sarana dan prasarana operasional.

❖ **Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Isu strategis bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan terdapat lima kelompok permasalahan, dapat diurutkan sebagai berikut :

1. Koordinasi perangkat daerah kabupaten dalam integrasi pengarusutamaan gender (PUG) di Kabupaten Belitang Timur;
2. Adanya respon berbagai pihak baik pemerintah maupun swasta dalam menjembatani kasus-kasus terhadap perempuan dan anak;
3. Peningkatan kegiatan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam bentuk sosialisasi ke masyarakat sehingga meningkatkan pengetahuan perempuan tentang hak-hak perempuan dan anak;
4. Implementasi peraturan daerah tentang perlindungan terhadap perempuan dan anak;
5. Mengoptimalkan pelaksanaan perencanaan dan penganggaran Responsif Gender (PPRG) dengan pendekatan 'three end' sebagaimana tertuang didalam RPJM 2022-2026 (Peraturan Presiden nomor 2 tahun 2015).

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AKHIR RKPD

Review terhadap Rancangan akhir Rencana Kerja Pembangunan Daerah perlu dilakukan dalam dalam rangka konsistensi pelaksanaan program dan kegiatan yang selaras dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang dituangkan dalam rencana kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Adapun review terhadap rancangan akhir RKPD Tahun 2024 adalah sebagai berikut:



**RENCANA KERJA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BELITUNG TIMUR
TAHUN 2024**

**Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2024
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Belitang Timur**

Rancangan Akhir RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Kode	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				20,979,636,598	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				20,979,636,598	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				15,193,357,308	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				15,193,357,308	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				15,193,357,308	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				15,193,357,308	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				1,461,606,300	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				1,461,606,300	
	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota				55,125,000	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota				55,125,000	
01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang					Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang					
		Kab. Belitang Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	2 Dokumen	55,125,000		Kab. Belitang Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	2 Dokumen	55,125,000	
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota				1,406,481,300	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota				1,406,481,300	
01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota					Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota					
		Kab. Belitang Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	837,900,000		Kab. Belitang Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	837,900,000	
02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota					Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota					
		Kab. Belitang Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	7 Orang	270,906,300		Kab. Belitang Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	7 Orang	270,906,300	



RENCANA KERJA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BELITONG TIMUR
TAHUN 2024

Rancangan Akhir RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Kode	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota					Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota					
		Kab. Belitong Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Keluarga	77,175,000		Kab. Belitong Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Keluarga	77,175,000	
04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota					Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota					
		Kab. Belitong Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	48 Lembaga	88,200,000		Kab. Belitong Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	48 Lembaga	88,200,000	
05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)					Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)					
		Kab. Belitong Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Sertifikat	132,300,000		Kab. Belitong Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Sertifikat	132,300,000	
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					685,562,500	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					685,562,500
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial					327,250,000	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial					327,250,000
01	Penyediaan Permakanan					Penyediaan Permakanan					
		Kab. Belitong Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang	84,700,000		Kab. Belitong Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang	84,700,000	
02	Penyediaan Sandang					Penyediaan Sandang					
		Kab. Belitong Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	120 Orang	60,637,500		Kab. Belitong Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	120 Orang	60,637,500	



RENCANA KERJA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BELITONG TIMUR
TAHUN 2024

Rancangan Akhir RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Kode	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
03	Penyediaan Alat Bantu					Penyediaan Alat Bantu					
		Kab. Belitong Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	55,125,000		Kab. Belitong Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	55,125,000	
05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial					Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial					
		Kab. Belitong Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	245 Orang	71,662,500		Kab. Belitong Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	245 Orang	71,662,500	
06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat					Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat					
		Kab. Belitong Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	55,125,000		Kab. Belitong Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	55,125,000	
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial					358,312,500	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial					358,312,500
02	Pemberian Layanan Kedaruratan					Pemberian Layanan Kedaruratan					
		Kab. Belitong Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	82,687,500		Kab. Belitong Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	82,687,500	
12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga					Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga					
		Kab. Belitong Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	7 Orang	165,375,000		Kab. Belitong Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	7 Orang	165,375,000	



RENCANA KERJA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BELITONG TIMUR
TAHUN 2024

Rancangan Akhir RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Kode	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
13	Pemberian Layanan Rujukan					Pemberian Layanan Rujukan					
		Kab. Belitong Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	110,250,000		Kab. Belitong Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	110,250,000	
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					1,745,525,000	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					1,745,525,000
Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar					151,250,000	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar					151,250,000
01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar					Penjangkauan Anak-Anak Terlantar					
		Kab. Belitong Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	36,300,000		Kab. Belitong Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	36,300,000	
02	Rujukan Anak-Anak Terlantar					Rujukan Anak-Anak Terlantar					
		Kab. Belitong Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Orang	84,700,000		Kab. Belitong Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Orang	84,700,000	
03	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar					Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar					
		Kab. Belitong Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	14 Orang	30,250,000		Kab. Belitong Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	14 Orang	30,250,000	
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota					1,594,275,000	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota					1,594,275,000
01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota					Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota					
		Kab. Belitong Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	44.173 Orang	418,950,000		Kab. Belitong Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	44.173 Orang	418,950,000	
02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota					Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota					



RENCANA KERJA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BELITONG TIMUR
TAHUN 2024

Rancangan Akhir RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Kode	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
		Kab. Belitong Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	17.438 Keluarga	150,000,000		Kab. Belitong Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	17.438 Keluarga	150,000,000	
03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga					Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga					
		Kab. Belitong Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Keluarga	959,175,000		Kab. Belitong Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Keluarga	959,175,000	
04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat					Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat					
		Kab. Belitong Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	66,150,000		Kab. Belitong Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	66,150,000	
PROGRAM PENANGANAN BENCANA					1,593,112,500	PROGRAM PENANGANAN BENCANA					1,593,112,500
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota					545,737,500	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota					545,737,500
01	Penyediaan Makanan					Penyediaan Makanan					
		Kab. Belitong Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	70 Orang	165,375,000		Kab. Belitong Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	70 Orang	165,375,000	
02	Penyediaan Sandang					Penyediaan Sandang					
		Kab. Belitong Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	70 Orang	110,250,000		Kab. Belitong Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	70 Orang	110,250,000	
03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi					Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi					



RENCANA KERJA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BELITUNG TIMUR
TAHUN 2024

Rancangan Akhir RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Kode	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
		Kab. Belitong Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Unit	66,150,000		Kab. Belitong Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Unit	66,150,000	
04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan					Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan					
		Kab. Belitong Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	70 Orang	66,150,000		Kab. Belitong Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	70 Orang	66,150,000	
05	Pelayanan Dukungan Psikososial					Pelayanan Dukungan Psikososial					
		Kab. Belitong Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	70 Orang	137,812,500		Kab. Belitong Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	70 Orang	137,812,500	
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota					1,047,375,000	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota					1,047,375,000
01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana					Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana					
		Kab. Belitong Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Kampung	110,250,000		Kab. Belitong Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Kampung	110,250,000	
02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana					Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana					
		Kab. Belitong Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	70 Orang	937,125,000		Kab. Belitong Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	70 Orang	937,125,000	
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					47,407,500	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					47,407,500
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota					47,407,500	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota					47,407,500
01	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota					Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota					



**RENCANA KERJA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BELITONG TIMUR
TAHUN 2024**

Rancangan Akhir RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
Kode	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)		
		Kab. Belitong Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1 Dokumen	47,407,500		Kab. Belitong Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1 Dokumen	47,407,500		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					9,660,143,508	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					9,660,143,508	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					6,185,592,630	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					6,185,592,630	
01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
		Kab. Belitong Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang/bulan	6,185,592,630		Kab. Belitong Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang/bulan	6,185,592,630		
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					61,271,438	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					61,271,438	
11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						
		Kab. Belitong Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	12 Orang	61,271,438		Kab. Belitong Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	12 Orang	61,271,438		
Administrasi Umum Perangkat Daerah					791,461,928	Administrasi Umum Perangkat Daerah					791,461,928	
01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						
		Kab. Belitong Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	37,705,500		Kab. Belitong Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	37,705,500		
02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
		Kab. Belitong Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	84,837,375		Kab. Belitong Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	84,837,375		



**RENCANA KERJA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BELITANG TIMUR
TAHUN 2024**

Rancangan Akhir RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Kode	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					
		Kab. Belitang Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	2,513,700		Kab. Belitang Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	2,513,700	
04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Penyediaan Bahan Logistik Kantor					
		Kab. Belitang Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	178,676,442		Kab. Belitang Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	178,676,442	
05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					
		Kab. Belitang Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	44,523,911		Kab. Belitang Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	44,523,911	
08	Fasilitasi Kunjungan Tamu					Fasilitasi Kunjungan Tamu					
		Kab. Belitang Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	33,075,000		Kab. Belitang Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	33,075,000	
09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
		Kab. Belitang Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	377,055,000		Kab. Belitang Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	377,055,000	
10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					
		Kab. Belitang Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	6 Dokumen	33,075,000		Kab. Belitang Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	6 Dokumen	33,075,000	



RENCANA KERJA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BELITONG TIMUR
TAHUN 2024

Rancangan Akhir RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
Kode	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					517,819,113	
02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
		Kab. Belitong Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	330,750,000		Kab. Belitong Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	330,750,000		
05	Pengadaan Mebel					Pengadaan Mebel						
		Kab. Belitong Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	37,705,500		Kab. Belitong Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	37,705,500		
06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
		Kab. Belitong Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	55,125,000		Kab. Belitong Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	55,125,000		
10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
		Kab. Belitong Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	72 Unit	94,238,613		Kab. Belitong Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	72 Unit	94,238,613		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1,404,843,261	
01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					Penyediaan Jasa Surat Menyurat						
		Kab. Belitong Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	172,109,897		Kab. Belitong Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	172,109,897		
02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						



RENCANA KERJA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BELITONG TIMUR
TAHUN 2024

Rancangan Akhir RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
Kode	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)		
		Kab. Belitong Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	134,734,320		Kab. Belitong Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	134,734,320		
04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
		Kab. Belitong Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1,097,999,044		Kab. Belitong Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1,097,999,044		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					699,155,138	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					699,155,138	
01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						
		Kab. Belitong Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	468,512,138		Kab. Belitong Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	468,512,138		
02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
		Kab. Belitong Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 Unit	110,250,000		Kab. Belitong Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 Unit	110,250,000		
06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
		Kab. Belitong Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	27,562,500		Kab. Belitong Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	27,562,500		
10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
		Kab. Belitong Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	37,705,500		Kab. Belitong Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	37,705,500		



RENCANA KERJA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BELITUNG TIMUR
TAHUN 2024

Rancangan Akhir RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
Kode	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)		
11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
		Kab. Belitang Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	16 Unit	55,125,000		Kab. Belitang Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	16 Unit	55,125,000		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					2,480,625,000	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					2,480,625,000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					2,480,625,000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					2,480,625,000	
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					771,750,000	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					771,750,000	
Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota					385,875,000	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota					385,875,000	
01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG					Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG						
		Kab. Belitang Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	110,250,000		Kab. Belitang Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	110,250,000		
03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG					Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG						
		Kab. Belitang Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	32 Perangkat Daerah	220,500,000		Kab. Belitang Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	32 Perangkat Daerah	220,500,000		
04	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG					Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG						
		Kab. Belitang Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk	32 Perangkat Daerah	55,125,000		Kab. Belitang Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk	32 Perangkat Daerah	55,125,000		



RENCANA KERJA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BELITUNG TIMUR
TAHUN 2024

Rancangan Akhir RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Kode	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
			Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota					Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota			
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota				220,500,000	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota				220,500,000	
01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi					Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi					
		Kab. Belitong Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	220,500,000		Kab. Belitong Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	220,500,000	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				165,375,000	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				165,375,000	
01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota					Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota					
		Kab. Belitong Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	1 Lembaga	165,375,000		Kab. Belitong Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	1 Lembaga	165,375,000	
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				441,000,000	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				441,000,000	
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				110,250,000	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				110,250,000	
01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota					Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota					
		Kab. Belitong Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	110,250,000		Kab. Belitong Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	110,250,000	



RENCANA KERJA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BELITONG TIMUR
TAHUN 2024

Rancangan Akhir RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Kode	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota				165,375,000	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota				165,375,000	
01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota					Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota					
		Kab. Belitong Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	10 Orang	165,375,000		Kab. Belitong Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	10 Orang	165,375,000	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				165,375,000	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				165,375,000	
03	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota					Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota					
		Kab. Belitong Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	50 Orang	165,375,000		Kab. Belitong Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	50 Orang	165,375,000	
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA				165,375,000	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA				165,375,000	
	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota				165,375,000	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota				165,375,000	
01	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota					Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota					
		Kab. Belitong Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	25 Layanan	165,375,000		Kab. Belitong Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	25 Layanan	165,375,000	
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK				165,375,000	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK				165,375,000	
	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				165,375,000	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				165,375,000	



RENCANA KERJA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BELITUNG TIMUR
TAHUN 2024

Rancangan Akhir RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Kode	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota					Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota					
		Kab. Belitang Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	165,375,000		Kab. Belitang Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	165,375,000	
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					441,000,000	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					441,000,000
Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota					441,000,000	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota					441,000,000
01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota					Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota					
		Kab. Belitang Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	5 Organisasi	220,500,000		Kab. Belitang Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	5 Organisasi	220,500,000	
02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota					Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota					
		Kab. Belitang Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	220,500,000		Kab. Belitang Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	220,500,000	
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					496,125,000	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					496,125,000
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					220,500,000	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					220,500,000
01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					



**RENCANA KERJA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BELITONG TIMUR
TAHUN 2024**

Rancangan Akhir RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
Kode	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)		
		Kab. Belitong Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	220,500,000		Kab. Belitong Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	220,500,000		
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					275,625,000	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					275,625,000	
01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						
		Kab. Belitong Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	275,625,000		Kab. Belitong Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	275,625,000		
					17,673,982,308						17,673,982,308	



2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Pada tahun anggaran 2024, tidak ada usulan program dan kegiatan dari masyarakat. Berikut tabel usulan program kegiatan dari para pemangku kepentingan tahun 2024:

**Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kabupaten Belitung Timur**

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	N	I	H	I	L

Perencanaan Kinerja adalah aktifitas pengambilan keputusan di depan tentang tingkat capaian kinerja yang diinginkan dan dihubungkan dengan tingkat pelaksanaan program/kegiatan, perencanaan kinerja juga memberikan target (quantitative objective) tentang apa yang harus dicapai dalam melaksanakan program dan kegiatan.

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan harus terintegrasi dengan rencana tindak (action plan) maupun perencanaan operasional yang lebih rinci. Untuk tujuan akuntabilitas kinerja, perencanaan kinerja merupakan alat untuk mengecek apakah organisasi dapat melaksanakan program dengan baik dan mengukur seberapa jauh target kinerja dapat dicapai.



**RENCANA KERJA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BELITONG TIMUR
TAHUN 2024**



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2024

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun sebagai penjabaran tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024. Selain itu penyusunan RKP juga dilakukan dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 memuat arah kebijakan nasional tahunan demi menjaga kesinambungan pembangunan secara terencana dan sistematis yang tanggap akan perubahan.

Pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024 dinyatakan bahwa RPJMN Tahun 2020–2024 merupakan tahapan penting dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005–2025 karena menjadi RPJMN tahap akhir dan penentu pencapaian target pembangunan dalam RPJPN Tahun 2005–2025. Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak awal tahun 2020 menjadi tantangan besar terhadap pencapaian sasaran RPJMN Tahun 2020–2024.

Sesuai arahan RPJPN Tahun 2005–2025, sasaran pembangunan jangka menengah tahun 2020–2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing. Dalam mewujudkan sasaran tersebut, diperlukan upaya yang optimal, peningkatan sinergi pemerintah pusat dan daerah serta penguatan kolaborasi pemerintah dengan seluruh pemangku kepentingan pembangunan.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 menjadi acuan penyusunan Visi dan Misi Presiden yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2020–2024. Sementara itu, Visi Presiden tahun 2020–2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” sedangkan Misi Presiden tertuang dalam sembilan poin Nawacita yang ditujukan untuk mencapai visi tersebut, yaitu (1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia; (2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing; (3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan; (4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan; (5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa; (6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan



Terpercaya; (7) Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga; (8) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya; serta (9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Guna meneguhkan dan mempercepat pencapaian tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara serta sebagai peta jalan menuju 100 tahun Indonesia merdeka, Presiden mengamanatkan untuk menyusun Visi Indonesia 2045 yang menjadi bagian integral dari RPJMN Tahun 2020–2024. Upaya pencapaian Visi Indonesia 2045 dimulai pada periode RPJMN Tahun 2020–2024.

Tema Pembangunan RKP Tahun 2024

Penyusunan tema pembangunan RKP Tahun 2024 dilakukan dengan mempertimbangkan sasaran RPJMN Tahun 2020–2024, arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2020, kebijakan pembangunan tahun 2021, serta berbagai isu strategis yang menjadi perhatian. Tema RKP Tahun 2024 juga disusun sebagai respons terhadap kondisi Indonesia yang sedang berada dalam proses pemulihan akibat pandemi Covid-19. Krisis kesehatan akibat pandemi Covid-19 telah berdampak sistemik terhadap pembangunan nasional, terutama pada aspek sosial dan ekonomi. Kontraksi ekonomi yang terjadi di Indonesia pada tahun 2020 mengakibatkan meningkatnya angka pengangguran, melemahnya daya beli masyarakat dan menurunnya produktivitas di sektor-sektor strategis. Kebijakan pemulihan ekonomi nasional masih perlu dilakukan pada tahun 2023, dan sekaligus menyiapkan landasan yang kokoh bagi Indonesia untuk melakukan transformasi ekonomi sesuai yang telah ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2020–2024.

Pandemi Covid-19 merupakan *unprecedented shock* yang mengubah secara signifikan pola interaksi antarmanusia, sehingga berimplikasi terhadap perubahan pola aktivitas ekonomi, sosial, serta pelayanan publik. Penerapan *social distancing* dan protokol kesehatan menuntut penggunaan teknologi digital secara intensif dalam mendukung aktivitas manusia. Kondisi demikian tetap akan berlangsung dalam kehidupan era *new normal*, meskipun *herd immunity* diharapkan telah tercapai di tahun 2023.

Berdasarkan hal tersebut, tema pembangunan RKP Tahun 2024 diarahkan untuk pemulihan dampak Covid-19 dengan berorientasi pada membangun ke depan dengan lebih baik (*Build Forward Better*). Adapun tema pembangunan RKP Tahun 2024 adalah **“Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”**.

Tema tersebut berfokus pada dua hal yaitu Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural. Pemulihan Ekonomi dapat diterjemahkan sebagai upaya pemulihan daya beli masyarakat dan dunia usaha serta diversifikasi ekonomi. Pemulihan daya beli dan dunia usaha yang dilakukan sejalan dengan penuntasan krisis kesehatan, dilakukan melalui pemberian bantuan untuk pemulihan dunia usaha, menjaga daya beli rumah tangga, serta percepatan pembangunan infrastruktur padat karya. Selain itu, dilakukan juga program-program khusus untuk mendongkrak kembali daya beli masyarakat dan membangkitkan dunia usaha. Pada saat



bersamaan, diversifikasi ekonomi dilakukan melalui program peningkatan nilai tambah, ketahanan pangan, pembangunan rendah karbon, dan pemerataan infrastruktur dan kualitas layanan digital.

Sasaran Pembangunan

Sasaran pembangunan tahun 2024 adalah:

- (1) Percepatan pemulihan ekonomi dengan indikator (a) pertumbuhan ekonomi, (b) tingkat pengangguran terbuka, (c) rasio gini, dan (d) penurunan emisi gas rumah kaca;
- (2) Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia dengan indikator (a) indeks pembangunan manusia dan (b) tingkat kemiskinan.

Untuk menjaga kesinambungan antara RKP Tahun 2024 dengan RPJMN Tahun 2020–2024, tujuh Agenda Pembangunan RPJMN tetap dipertahankan menjadi tujuh Prioritas Nasional sebagai koridor pencapaian tema, arah kebijakan dan strategi pembangunan tahun 2022. Prioritas Nasional tersebut didukung dengan pelaksanaan 45 Proyek Prioritas Strategis/Major Project yang memiliki daya ungkit tinggi dalam mencapai target-target pembangunan.

7 (tujuh) Prioritas Nasional, yaitu :

1. **Prioritas Nasional 1, Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan**
2. **Prioritas Nasional 2, Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan**
3. **Prioritas Nasional 3, Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing**
Pembangunan SDM Indonesia diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM, yang merupakan salah satu prasyarat dalam upaya pemulihan pembangunan akibat pandemi Covid-19. Pembangunan SDM pada tahun 2024 akan ditekankan pada reformasi sistem kesehatan nasional, reformasi sistem perlindungan sosial, percepatan penurunan kematian ibu dan stunting, pembangunan Science-Techno Park, serta pendidikan dan pelatihan vokasi untuk industri.

Arah kebijakan :

1. Peningkatan produktivitas dan daya saing;
2. **Pengentasan kemiskinan;**
3. **Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;**
4. Pengendalian pertumbuhan penduduk dan memperkuat tata kelola kependudukan;
5. **Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;**
6. Peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta; dan
7. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas



4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
7. **Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**

Sebagai operasionalisasi dari arah kebijakan, maka disusun 10 (sepuluh) strategi pembangunan, yakni :

1. meningkatkan nilai tambah sektor industri;
2. mempercepat pemulihan dan pertumbuhan sektor pariwisata;
3. meningkatkan ketahanan pangan masyarakat;
4. meningkatkan peran UMKM terhadap ekonomi nasional;
5. meningkatkan pemerataan infrastruktur;
6. meningkatkan pemerataan dan kualitas layanan digital;
7. meningkatkan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK);
8. mempercepat reformasi perlindungan sosial;
9. meningkatkan kualitas SDM dan inovasi; serta
10. memperkuat sistem kesehatan nasional dan penanganan *Covid-19*.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2024

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengusung tema pembangunan, “**Mewujudkan Stabilitas Ekonomi Lokal dan Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Pelayanan Dasar**”, dengan 6 (Enam) Prioritas Pembangunan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. **Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat;**
2. Meningkatkan kapasitas dan layanan kesehatan masyarakat;
3. Meningkatkan Kualitas SDM;
4. Mengembangkan potensi sektor pertanian;
5. Mengembangkan potensi sektor Perikanan dan kelautan;
6. Mengembangkan potensi sektor pariwisata.

Dari tema pembangunan tersebut, akan kita implementasikan melalui program dan kegiatan pembangunan daerah, guna mempercepat pemulihan ekonomi dan kesehatan yang berdasarkan potensi unggulan daerah dengan tetap mengedepankan kebijakan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing sesuai amanat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Arah kebijakan, prioritas dan fokus pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2024 merupakan upaya untuk mencapai target kinerja utama daerah tahun 2024 yaitu:

1. Pertumbuhan Ekonomi;
2. Tingkat Kemiskinan;
3. Tingkat Pengangguran Terbuka;
4. Rasio Gini;



5. Indeks Pembanguna Manusia (IPM).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (RKPD) Kabupaten Belitong Timur 2024

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang terdiri dari RKPD, Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah (PD). RKPD memuat gambaran umum kondisi daerah, rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

RKPD memuat arah dan kebijakan pembangunan daerah selama setahun, yang diperoleh dari Renja PD sehingga menjadi dasar bagi perumusan perencanaan pembangunan daerah. Dokumen RKPD sekurang-kurangnya memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik berasal dari APBD, APBN maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dalam mekanismenya, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 20 dinyatakan bahwa Bappeda menyiapkan rancangan akhir RKPD sebagai penjabaran dari RPJM Daerah. Sejalan dengan ketentuan tersebut di atas, sebagai petunjuk operasionalnya diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dimana dalam Pasal 22 dijelaskan bahwa Bappeda menyusun rancangan akhir RKPD, yang merupakan penjabaran dari RPJMD. Dalam prosesnya, penyusunan RKPD Kabupaten Belitong Timur Tahun 2023 merujuk pada rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 Kabupaten Belitong Timur, khususnya memasuki tahap ke-4 RPJPD. Mengingat RKPD merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, maka RKPD 2023 merujuk pada dokumen dokumen perencanaan yang sudah ada. Penetapan program prioritas yang tertuang dalam RKPD 2023 berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkesinambungan dan berkelanjutan sesuai dengan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah serta mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Belitong Timur Tahun 2023 disusun dengan menggunakan pendekatan penganggaran berbasis *“money follow priority programme”* tidak lagi menggunakan pendekatan *“money follow function”* melalui penganggaran berbasis kinerja dan dengan pendekatan perencanaan partisipatif yang melibatkan peran serta masyarakat sebagai *stakeholders* dengan proses yang partisipatif, memungkinkan masyarakat menyalurkan aspirasinya dan mampu memantau kinerja pemerintah, sehingga semakin



meningkatkan transparansi dan akuntabilitas aparat pemerintah dalam mengakomodasi berbagai kepentingan masyarakat.

Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 merupakan upaya mencapai target pembangunan daerah tahun 2024, juga untuk mendukung kebijakan pembangunan Nasional dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024. Prioritas RKP Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- 2. Peningkatan Pelayanan Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat**
3. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah untuk Pengembangan Ekonomi.
4. Pemulihan Stabilitas Ekonomi Melalui Pengembangan Sektor-sektor Prioritas
5. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengurangan Resiko Bencana
6. Peningkatan Ketahanan Pangan.

Dengan pertimbangan kondisi makro dan fiskal pada 2021 dan target 2022, maka kata kunci dalam RKP pada 2024 diarahkan pada empat hal, yaitu kemiskinan, lapangan kerja, Usaha Menengah, Kecil dan Mikro (UMKM), serta industri. Investasi dan ekspor akan menjadi kunci pemulihan pada 2023, dengan pertumbuhan produk domestik bruto antara 5,4–6,0 persen secara *year on year*. Dengan prediksi perekonomian dapat relatif bebas dari tekanan pandemi Covid-19, tahun 2024 merupakan tahun kunci bagi Indonesia untuk melakukan pemulihan dan akselerasi pertumbuhan ekonomi, sektor industri pengolahan diharapkan menjadi motor pertumbuhan, sementara sektor-sektor yang sebelumnya terdampak Covid-19, seperti perdagangan dan penyediaan akomodasi dan makan minum, diperkirakan akan mengalami akselerasi. Penanganan kesehatan melalui penguatan sistem kesehatan nasional akan tetap menjadi fondasi bagi pemulihan dan transformasi ekonomi yang berkelanjutan. Sesuai amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, RKP 2023 akan melanjutkan tujuh prioritas pembangunan nasional dengan 10 *Major Project* yang berkaitan langsung dengan Tema RKP 2023, yaitu Transformasi Digital, Peningkatan Peran UMKM, Kawasan Industri dan 31 *Smelter*, Pengembangan 10 Destinasi Wisata, *Food Estate*, Energi Terbarukan, *Major Project* di Wilayah Papua, Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu, Sistem Kesehatan Nasional, dan Ibu Kota Negara.

Sehubungan dengan sinkronisasi prioritas pembangunan dan program/kegiatan OPD yang dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi OPD, Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung Timur dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan yang diberikan, telah melaksanakan program/kegiatan yang diselaraskan dengan Prioritas Nasional, Provinsi dan Daerah.

Sesuai Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Interventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Beltim melaksanakan 14 Program, 27 Kegiatan, dan 78 Subkegiatan. Dinas Sosial,



Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengampu 1 urusan wajib Pelayanan dasar, dan 2 urusan wajib non pelayanan dasar.



**RENCANA KERJA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BELITONG TIMUR
TAHUN 2024**

Sinkronisasi prioritas pembangunan tahun 2024 sebagaimana tergambar pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.1
Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Tahun 2024**

NO	Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Prioritas Nasional (PN 3) : Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing Arah kebijakan : Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial; Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda; Pengentasan kemiskinan	Prioritas Pembangunan Daerah II (PP 1) : Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat	Prioritas Pembangunan Daerah (PD 2) : Peningkatan Pelayanan Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat	Urusan Sosial			5,533,213,800.00	
				1. Program Pemberdayaan Sosial			1,461,606,300.00	
					Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota			55,125,000
						Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang		55,125,000
					Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota			1,406,481,300
						Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/ Kota		270,906,300
						Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)		132,300,000
						Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		837,900,000
						Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		88,200,000
					Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial		77,175,000	



**RENCANA KERJA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BELITONG TIMUR
TAHUN 2024**

NO	Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8
						Keluarga Kewenangan Kabupaten/ a	
				2. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan			47,407,500
				2. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		47,407,500
					Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		47,407,500
				3. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan			-
				3. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/ Kelurahan Asal		-
					Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal		-
				4. Program Rehabilitasi Sosial			685,562,500
				4. Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		327,250,000
					Penyediaan Permakanan		84,700,000
					Penyediaan Sandang		60,637,500
					Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat		55,125,000
					Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial		71,662,500



**RENCANA KERJA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BELITONG TIMUR
TAHUN 2024**

NO	Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8
						Penyediaan Alat Bantu	55,125,000
					Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		358,312,500
						Penyediaan Alat Bantu	
						Pemberian Layanan Rujukan	110,250,000
						Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	-
						Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	-
						Penyediaan Sandang	
						Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	165,375,000
						Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	-
						Penyediaan Permakanan	-
						Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	-
						Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	-
						Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	-
						Pemberian Layanan Kedaruratan	82,687,500



**RENCANA KERJA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BELITONG TIMUR
TAHUN 2024**

NO	Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8
						Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	-
				5. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial			1,745,525,000
					Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar		151,250,000
						Rujukan Anak-Anak Terlantar	84,700,000
						Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	36,300,000
						Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	30,250,000
					Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		1,594,275,000
						Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	959,175,000
						Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	150,000,000
						Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	418,950,000
						Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	66,150,000
				6. Program Penanganan Bencana		1,593,112,500	
					Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		545,737,500
						Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	66,150,000
						Penyediaan Sandang	110,250,000
						Pelayanan Dukungan Psikososial	137,812,500
				Penyediaan Makanan		165,375,000	



**RENCANA KERJA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BELITONG TIMUR
TAHUN 2024**

NO	Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8
						Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	66,150,000
					Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota		1,047,375,000
						Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	110,250,000
						Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	937,125,000
				Urusan Pemberdayaan, Perempuan dan Perlindungan Anak			2,480,625,000
				7. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan			771,750,000
					Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota		385,875,000
						Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	220,500,000
						Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	110,250,000
						Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	55,125,000
				Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota			220,500,000
						Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	220,500,000



**RENCANA KERJA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BELITONG TIMUR
TAHUN 2024**

NO	Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8
					Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		165,375,000
						Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	165,375,000
						Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	-
				8. Program Perlindungan Perempuan			441,000,000
					Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		110,250,000
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	110,250,000
					Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota		165,375,000
						Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	165,375,000
					Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		165,375,000



**RENCANA KERJA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BELITONG TIMUR
TAHUN 2024**

NO	Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8
						Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	-
						Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	165,375,000
				9. Program Peningkatan Kualitas Keluarga			165,375,000
					Penyediaan Layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kabupaten/kota		165,375,000
						Pelaksanaan penyediaan layanan kompherhensif bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan perlindungan anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kabupaten/kota	165,375,000
				10. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak			165,375,000
					Pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat daerah kabupaten/kota		165,375,000
						Penyediaan data gender dan anak di kewenangan kabupaten/kota	165,375,000
				11. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)			441,000,000
					Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		441,000,000
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	220,500,000



**RENCANA KERJA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BELITONG TIMUR
TAHUN 2024**

NO	Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8
						Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	220,500,000
					Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		-
						Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	-
						Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	-
				10. Program Perlindungan Khusus Anak			496,125,000
					Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		-
						Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	-
					Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		220,500,000
						Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	220,500,000



**RENCANA KERJA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BELITUNG TIMUR
TAHUN 2024**

NO	Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8
					Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		275,625,000
						Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	275,625,000

Sumber data : Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024, RKPd Provinsi Kep. Bangka Belitung, RKPd Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur



3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Tujuan dan sasaran merupakan turunan atau penjabaran secara operasional yang akan berjalan selaras dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Penjabaran ini nantinya akan menjadi penghubung dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang dituangkan dalam bentuk strategi dan arah kebijakan daerah.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai sebuah visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Dalam perencanaan kebijakan, tak terkecuali RPJMD, tahapan perumusan tujuan layaknya titik kritis. Hal tersebut dikarenakan tingkatannya yang tinggi secara prioritas sehingga ikut mempengaruhi penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Secara alur, visi–misi Bupati dan Wakil Bupati untuk periode lima tahun akan menjadi landasan serta dijabarkan kedalam sebuah tujuan untuk dioperasionalkan lewat program– program penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, tercapainya tujuan juga dianggap sebagai impact keberhasilan dari tercapainya program – program yang ditetapkan.

Dalam rangka menunjang visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Kabupaten Belitong Timur Tahun 2021-2026, maka Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitong Timur menentukan arah tujuan dan sasaran sesuai dengan pencapaian Misi, Tujuan dan Sasaran, yaitu :

Misi I : Membenahi manajemen penyelenggaraan ketatapemerintahan pemerintah Kabupaten Belitong Timur agar berjalan sesuai dengan asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik;

Tujuan 2 : Terwujudnya pelayanan publik yang efektif dan efisien;

Sasaran : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik;

Sasaran : Terwujudnya Pelayanan Publik Berbasis Elektronik

Misi III : Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Belitong Timur dan pengentasan kemiskinan;

Tujuan 3 : Meningkatnya kesejahteraan masyarakat;

Sasaran : Menurunnya Tingkat Kemiskinan;

Sasaran : Terwujudnya pemerataan perlindungan dan jaminan sosial



Sebagai Dinas yang memiliki peran dalam bidang sosial, dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, maka Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitong Timur dalam waktu 5 (lima) tahun kedepan akan melaksanakan 2 (dua) misi dari 3 (tiga) misi yang ada, yaitu misi ke-1 (satu) dan ke-3 (tiga).

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitong Timur mengacu pada tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Belitong Timur 2021-2026.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitong Timur 2021 – 2026 dirumuskan sebagai berikut :

1. TUJUAN

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik;
2. Terwujudnya Pelayanan Publik Berbasis Elektronik (SPBE);
3. Menurunnya tingkat kemiskinan;
4. Terwujudnya pemerataan perlindungan dan jaminan sosial.

2. SASARAN

1. Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja;
2. Meningkatnya pengelolaan sistem data gender dan anak;
3. Meningkatnya Pelayanan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
4. Berkurangnya jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
5. Terwujudnya kesetaraan gender dan terlaksananya fasilitasi perlindungan perempuan dan anak;



**RENCANA KERJA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BELITUNG TIMUR
TAHUN 2024**

Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja disajikan pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 3.2
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Tujuan/Sasaran strategis	Target 2024	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target 2024	Ket
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang	88,31 - 100 : A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan	100	
			Nilai AKIP Perangkat Daerah	B >60-70	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Pelaporan Keuangan dan Aset yang disusun sesuai standar	100	
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Org/bln		
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase aparatur yang berkinerja baik	100		
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	12 Orang		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	100		
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		
Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan						
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan						



**RENCANA KERJA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BELITONG TIMUR
TAHUN 2024**

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Tujuan/Sasaran strategis	Target 2024	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target 2024	Ket
					Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	6 Dokumen	
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase paket pengadaan barang & jasa yang dilaksanakan sesuai SOP	80	
					Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	
					Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	72 Unit	
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyediaan Jasa Penunjang Kantor	100	
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	80	
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 Unit	
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	



**RENCANA KERJA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BELITUNG TIMUR
TAHUN 2024**

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Tujuan/Sasaran strategis	Target 2024	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target 2024	Ket
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	16 Unit	
2	Terwujudnya Pelayanan Publik Berbasis Elektronik (SPBE)	Meningkatnya pengelolaan sistem data gender dan anak	Persentase Pengelolaan sistem Data Gender dan anak yang tersedia	100	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Meningkatnya pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data gender	Jumlah Dokumen data gender yang tersedia	1	
					Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data gender	Persentase Dokumen data gender yang tersedia	100	
					Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	
3	Menurunnya Tingkat Kemiskinan	Meningkatnya Pelayanan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase potensi sumber kesejahteraan sosial yang diberdayakan	100	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Meningkatnya Layanan penyaluran dan pengumpulan kepada masyarakat yang membutuhkan	Persentase penyaluran uang atau barang hasil pengumpulan kepada masyarakat yang membutuhkan	100	
					Meningkatnya pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial	Persentase potensi sumber kesejahteraan sosial yang diberdayakan	100		
					Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase penyaluran uang atau barang hasil pengumpulan kepada masyarakat yang membutuhkan (Persen)	100	
					Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	2 Dokumen	
					Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya potensi sumber kesejahteraan sosial	persentase potensi sumber kesejahteraan sosial yang diberdayakan	100	
					Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	
					Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	7 Orang	



**RENCANA KERJA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BELITUNG TIMUR
TAHUN 2024**

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Tujuan/Sasaran strategis	Target 2024	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target 2024	Ket
					Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Keluarga	
					Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	48 Lembaga	
					Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)		Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Sertifikat	
					PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Meningkatkan pelayanan keluarga	Jumlah Keluarga yang terlayani	50	
					Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya pelayanan bagi keluarga	Persentase Keluarga yang terlayani	100	
					Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	25 Layanan	
4	Terwujudnya Pemerataan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Berkurangnya jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	97,50	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Meningkatkan pelayanan PPKS di luar panti	Persentase PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial), Keluarga dan Masyarakat yang Mendapat Pelayanan rehabilitasi sosial diluar panti	100	
					Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Meningkatnya pelayanan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti Sosial	100	
					Penyediaan Permakanan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang	



**RENCANA KERJA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BELITUNG TIMUR
TAHUN 2024**

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Tujuan/Sasaran strategis	Target 2024	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target 2024	Ket
					Penyediaan Sandang		Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	120 Orang	
					Penyediaan Alat Bantu		Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/ Kota	20 Orang	
					Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	245 Orang	
					Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat		Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	25 Orang	
					Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Meningkatnya pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti Sosial	100	
					Pemberian Layanan Kedaruratan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	
					Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	7 Orang	
					Pemberian Layanan Rujukan		Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	
					PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Meningkatnya kesejahteraan anak terlantar dan fakirmiskin	Persentase Anak terlantar dan fakir miskin yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial selama satu tahun	100	
						Meningkatnya kesejahteraan hidup bagi masyarakat miskin	Persentase pemberi bantuan sosial	100	



**RENCANA KERJA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BELITUNG TIMUR
TAHUN 2024**

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Tujuan/Sasaran strategis	Target 2024	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target 2024	Ket
						Meningkatnya kemampuan PPKS	Persentase PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang menerima program pemberdayaan sosial	100	
					Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Meningkatnya kualitas hidup bagi anak terlantar	Persentase Anak Terlantar yang mendapatkan jaminan sosial selama satu tahun	100	
					Penjangkauan Anak-Anak Terlantar		Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/ Kota	25 Orang	
					Rujukan Anak-Anak Terlantar		Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Orang	
					Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar		Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	14 Orang	
					Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	meningkatkan kualitas hidup bagi fakir miskin	Persentase Jumlah fakir miskin yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial		
					Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	44.173 Orang	
					Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/ Kota	17.438 Keluarga	
					Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga		Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Keluarga	
					Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat		Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	
					PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	Persentase Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	100	
					Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Meningkatkan Perlindungan sosial korban bencana	Persentase Perlindungan sosial Bencana Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	100	



**RENCANA KERJA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BELITONG TIMUR
TAHUN 2024**

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Tujuan/Sasaran strategis	Target 2024	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target 2024	Ket
					Penyediaan Makanan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanaan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	70 Orang	
					Penyediaan Sandang		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	70 Orang	
					Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi		Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Unit	
					Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	70 Orang	
					Pelayanan Dukungan Psikososial		Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/ Kota	70 Orang	
					Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Meningkatnya kemampuan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota		
					Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana		Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Kampung	
					Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana		Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	70 Orang	
					PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Meningkatnya pengelolaan taman makam terkelola	Persentase taman makam pahlawan yang terkelola	100	
					Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Meningkatnya pemeliharaan taman makam terkelola	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota yang dipelihara	100	
					Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1 Dokumen	



**RENCANA KERJA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BELITUNG TIMUR
TAHUN 2024**

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Tujuan/Sasaran strategis	Target 2024	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target 2024	Ket	
		Terwujudnya Kesetaraan Gender dan terlaksananya fasilitasi perlindungan perempuan dan anak	Anugrah Parahita Ekapraya	Madya	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Meningkatnya perencanaan RAD PUG di Kab/Kota	Persentase pelaksanaan RAD PUG	80		
			Kabupaten Layak Anak	Madya		Meningkatnya partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan	50		
						meningkatkan Industri Rumahan	Jumlah IR yang terbina	80		
						Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pelebagaan Pengarusutamaan Gender pada lembaga pemerintah	Persentase Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	100	
						Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	
						Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	32 Perangkat Daerah	
						Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG		Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	32 Perangkat Daerah	
						Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya jumlah perempuan dibidang politik	Persentase Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	100	
						Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi		Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	



**RENCANA KERJA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BELITONG TIMUR
TAHUN 2024**

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Tujuan/Sasaran strategis	Target 2024	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target 2024	Ket
					Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya pelayanan pemberdayaan perempuan di lembaga	Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	100	
					Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	1 Lembaga	
					PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Meningkatnya kualitas Layanan kompherhensif korban kekerasan pada perempuan	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	100	
					Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Persentase Koordinasi terkait Pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak	100	
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	
					Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	meningkatnya pelayanan rujukan perempuan korban kekerasan	Persentase Layanan Rujukan bagi Perempuan Korban Kekerasan	100	
					Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	10 Orang	
					Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Layanan perlindungan perempuan dilembaga lembaga	Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100	
					Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	50 Orang	
					PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Meningkatnya Jumlah Forum anak Desa yang terbentuk	Forum Anak Desa	9 Desa	



**RENCANA KERJA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BELITONG TIMUR
TAHUN 2024**

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Tujuan/Sasaran strategis	Target 2024	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target 2024	Ket
						Meningkatnya Kualitas PPPA	Jumlah peraturan perundangan dan kebijakan PHPA	3 Aturan	
					Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya kualitas Kabupaten Layak Anak	Persentase Kabupaten Layak Anak	100	
					Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	5 Organisasi	
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	
					PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Meningkatnya pelayanan anak kategori perlindungan khusus	Persentase anak yang mendapat layanan dalam kategori perlindungan khusus	100	
					Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	Persentase Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100	
					Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	
					Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Penguatan Lembaga layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus	Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100	
					Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	



3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Program Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitong Timur merupakan penjabaran dari Revisi Perubahan RENSTRA Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Belitong Timur serta Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana tertuang dalam struktur organisasi dan tata kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belitong Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitong Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitong Timur.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan sosial, dan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang secara berjenjang dilaksanakan pada setiap tahun anggaran berjalan mempedomani kepada dokumen yang disepakati dan dibutuhkan daerah.

Pada penyusunan rancangan akhir, Program/kegiatan yang akan mendukung tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada Anggaran tahun 2024, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitong Timur melaksanakan 12 (dua belas) program, 26 (dua puluh enam) Kegiatan dan 65 (enam puluh lima) Sub kegiatan. Seluruh program/kegiatan/subkegiatan ini telah disesuaikan dengan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Program tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

Kode		Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1	06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL		
1	06	02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	
1	06	02	2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
1	06	02	2.02	01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang
1	06	02	2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
1	06	02	2.03	01 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
1	06	02	2.03	02 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota
1	06	02	2.03	03 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
1	06	02	2.03	04 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
1	06	02	2.03	05 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)



Kode		Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		
1	06	04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
1	06	04	2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
1	06	04	2.01	01 Penyediaan Permakanan
1	06	04	2.01	02 Penyediaan Sandang
1	06	04	2.01	03 Penyediaan Alat Bantu
1	06	04	2.01	05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
1	06	04	2.01	06 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
1	06	04	2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
1	06	04	2.02	02 Pemberian Layanan Kedaruratan
1	06	04	2.02	12 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
1	06	04	2.02	13 Pemberian Layanan Rujukan
1	06	05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
1	06	05	2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar
1	06	05	2.01	01 Penjangkauan Anak-Anak Terlantar
1	06	05	2.01	02 Rujukan Anak-Anak Terlantar
1	06	05	2.01	03 Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar
1	06	05	2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
1	06	05	2.02	01 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
1	06	05	2.02	02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
1	06	05	2.02	03 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
1	06	05	2.02	04 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
1	06	06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	
1	06	06	2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
1	06	06	2.01	01 Penyediaan Makanan
1	06	06	2.01	02 Penyediaan Sandang
1	06	06	2.01	03 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi
1	06	06	2.01	04 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
1	06	06	2.01	05 Pelayanan Dukungan Psikososial
1	06	06	2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
1	06	06	2.02	01 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana
1	06	06	2.02	02 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana
1	06	07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	
1	06	07	2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
1	06	07	2.01	01 Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
1	06	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
1	06	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1	06	01	2.02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1	06	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1	06	01	2.05	11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan



Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	
1	06	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
1	06	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1	06	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1	06	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
1	06	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1	06	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
1	06	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu
1	06	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1	06	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
1	06	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
1	06	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1	06	01	2.07	05	Pengadaan Mebel
1	06	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1	06	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1	06	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
1	06	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1	06	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1	06	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1	06	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
1	06	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
1	06	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1	06	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1	06	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1	06	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
2	08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
2	08	02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		
2	08	02	2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	
2	08	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG
2	08	02	2.01	03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG
2	08	02	2.01	04	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG
2	08	02	2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	
2	08	02	2.02	01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
2	08	02	2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	
2	08	02	2.03	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
2	08	03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		



Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
2	08	03	2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
2	08	03	2.01	01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
2	08	03	2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
2	08	03	2.02	01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
2	08	03	2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2	08	03	2.03	03 Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
2	08	04		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
2	08	04	2.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
2	08	04	2.03	01 Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
2	08	05		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK
2	08	05	2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2	08	05	2.01	01 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota
2	08	06		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
2	08	06	2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
2	08	06	2.01	01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
2	08	06	2.01	02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
2	08	07		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
2	08	07	2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2	08	07	2.02	01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2	08	07	2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2	08	07	2.03	01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka menunjang Visi, Misi serta Tujuan dan Sasaran Bupati Belitang Timur yang telah ditetapkan. Indikator program (*outcome*) yang direncanakan merupakan kinerja yang harus dicapai oleh masing-masing bidang pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitang Timur. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Belitang Timur dalam menyusun rencana kerja tahun 2024 sejalan dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kab. Belitang Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kab. Belitang Timur. Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk maka ada beberapa Perangkat daerah yang mengalami perubahan Susunan Perangkat Daerah, salah satunya Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang mana menyelenggarakan 3 (tiga) urusan pemerintahan dipisah menjadi 2 (dua) Perangkat Daerah yaitu Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Dengan adanya perubahan tersebut berdampak pada penyesuaian perubahan Dokumen Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang sedang disusun.

Pada penyusunan rancangan akhir, Program/kegiatan yang akan mendukung tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada Anggaran tahun 2024, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitang Timur melaksanakan 12 (dua belas) program, 26 (dua puluh enam) Kegiatan dan 65 (enam puluh lima) Sub kegiatan dengan total kebutuhan anggaran pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitang Timur Tahun 2024 sebesar **Rp. 17.673.982.308,- (Tujuh Belas Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Delapan Rupiah)**. Seluruh program/kegiatan/subkegiatan ini telah disesuaikan dengan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Lebih jelasnya dijabarkan seperti berikut ini :



**RENCANA KERJA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BELITANG TIMUR
TAHUN 2024**

**Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024
Dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Belitang Timur**

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Tolok Ukur		Target				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							15.957.322.674				
1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							15.957.322.674				
1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL							1.534.686.615				
1	06	02	2.02		Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota							57.881.250				
1	06	02	2.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang											
					Persentase penyaluran uang atau barang hasil pengumpulan kepada masyarakat yang membutuhkan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Persentase penyaluran uang atau barang hasil pengumpulan kepada masyarakat yang membutuhkan (Persen)	Kab. Belitang Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	2 Dokumen	100	55,125,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	2 Dokumen	57.881.250
1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota							1.476.805.365				
1	06	02	2.03	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota											
					Persentase potensi sumber kesejahteraan sosial yang diberdayakan	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	persentase potensi sumber kesejahteraan sosial yang diberdayakan	Kab. Belitang Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	40 Orang	100	837,900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	879.795.000



**RENCANA KERJA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BELITONG TIMUR
TAHUN 2024**

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
1.06.02.03.02		Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota													
		Persentase potensi sumber kesejahteraan sosial yang diberdayakan	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	persentase potensi sumber kesejahteraan sosial yang diberdayakan	Kab. Belitong Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	7 Orang	100	270,906,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	7 Orang	284.451.615	
1.06.02.03.03		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota													
		Persentase potensi sumber kesejahteraan sosial yang diberdayakan	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	persentase potensi sumber kesejahteraan sosial yang diberdayakan	Kab. Belitong Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	40 Keluarga	100	77,175,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Keluarga	81.033.750	
1.06.02.03.04		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota													
		Persentase potensi sumber kesejahteraan sosial yang diberdayakan	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	persentase potensi sumber kesejahteraan sosial yang diberdayakan	Kab. Belitong Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	48 Lembaga	100	88,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	48 Lembaga	92.610.000	
1.06.02.03.05		Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)													



**RENCANA KERJA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BELITUNG TIMUR
TAHUN 2024**

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
		Persentase potensi sumber kesejahteraan sosial yang diberdayakan	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	persentase potensi sumber kesejahteraan sosial yang diberdayakan	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	25 Sertifikat	100	132,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Sertifikat	138.915.000	
1	06	04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL						685,562,500		724.075.625				
1	06	04	2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial						327,250,000		347.847.500			
1	06	04	2.	Penyediaan Permakanan											
			01	Persentase PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial), Keluarga dan Masyarakat yang Mendapat Pelayanan rehabilitasi sosial diluar panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti Sosial	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	150 Orang	100	84,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang	93.170.000
1	06	04	2.	Penyediaan Sandang											
			01												



**RENCANA KERJA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BELITUNG TIMUR
TAHUN 2024**

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
		Persentase PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial), Keluarga dan Masyarakat yang Mendapat Pelayanan rehabilitasi sosial diluar panti	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti Sosial	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	120 Orang	100	60,637,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	120 Orang	63.669.375
1	06	04	2.01	03	Penyediaan Alat Bantu									
		Persentase PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial), Keluarga dan Masyarakat yang Mendapat Pelayanan rehabilitasi sosial diluar panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti Sosial	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	20 Orang	100	55,125,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	57.881.250
1	06	04	2.01	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial									



**RENCANA KERJA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BELITANG TIMUR
TAHUN 2024**

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target			
		Persentase PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial), Keluarga dan Masyarakat yang Mendapat Pelayanan rehabilitasi sosial diluar panti	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti Sosial	Kab. Belitang Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	245 Orang	100	71,662,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	245 Orang	75.245.625	
1	06	04	2.01	06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat										
		Persentase PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial), Keluarga dan Masyarakat yang Mendapat Pelayanan rehabilitasi sosial diluar panti	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti Sosial	Kab. Belitang Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	25 Orang	100	55,125,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	57.881.250	
1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial				358,312,500						376.228.125
1	06	04	2.02	02	Pemberian Layanan Kedaruratan										



**RENCANA KERJA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BELITUNG TIMUR
TAHUN 2024**

Kode	Urusan / Bidang / Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target		
		Persentase PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial), Keluarga dan Masyarakat yang Mendapat Pelayanan rehabilitasi sosial diluar panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti Sosial	Kab. Belitang Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	10 Orang	100	82,687,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	86.821.875
1	06	04	2.02	1.2	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga									
		Persentase PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial), Keluarga dan Masyarakat yang Mendapat Pelayanan rehabilitasi sosial diluar panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti Sosial	Kab. Belitang Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	7 Orang	100	165,375,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	7 Orang	173.643.750
1	06	04	2.02	1.3	Pemberian Layanan Rujukan									



**RENCANA KERJA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BELITANG TIMUR
TAHUN 2024**

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
		Persentase PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial), Keluarga dan Masyarakat yang Mendapat Pelayanan rehabilitasi sosial diluar panti	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti Sosial	Kab. Belitang Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	5 Orang	100	110,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	115.762.500		
1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				1,745,525,000					1.832.863.750		
1	06	05	2.01		Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar				151,250,000					166.375.000		
1	06	05	2.01	01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar											
					Persentase Anak terlantar dan fakir miskin yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial selama satu tahun	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Anak Terlantar yang mendapatkan jaminan sosial selama satu tahun	Kab. Belitang Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	25 Orang	100	36,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	39.930.000
1	06	05	2.01	02	Rujukan Anak-Anak Terlantar											
					Persentase Anak terlantar dan fakir miskin yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial selama satu tahun	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Anak Terlantar yang mendapatkan jaminan sosial selama satu tahun	Kab. Belitang Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	3 Orang	100	84,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Orang	93.170.000
1	06	05	2.01	03	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar											



**RENCANA KERJA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BELITUNG TIMUR
TAHUN 2024**

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
		Persentase Anak terlantar dan fakir miskin yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial selama satu tahun	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Anak Terlantar yang mendapatkan jaminan sosial selama satu tahun	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	14 Orang	100	30,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	14 Orang	33.275.000		
1	06	05	2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota					1,594,275,000			1.666.488.750				
1	06	05	2.02	01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota											
					Persentase Anak terlantar dan fakir miskin yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial selama satu tahun	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Persentase Jumlah fakir miskin yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	44.173 Orang	100	418,950,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	44173 Orang	439.897.500
1	06	05	2.02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota											
					Persentase Anak terlantar dan fakir miskin yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial selama satu tahun	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah fakir miskin yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	17.438 Keluarga	100	150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	17.438 Keluarga	150.000.000
1	06	05	2.02	03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga											



**RENCANA KERJA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BELITUNG TIMUR
TAHUN 2024**

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
		persentase pemberian bantuan sosial	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah fakir miskin yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	20 Keluarga	100	959,175,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Keluarga	1.007.133.750
1	06	05	2.02	04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat									
		persentase pemberian bantuan sosial	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah fakir miskin yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	10 Orang	100	66,150,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	69.457.500
1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA				1,593,112,500					1.672.768.225
1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota				545,737,500					573.024.375
1	06	06	2.01	01	Penyediaan Makanan									
		Persentase Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Perlindungan sosial Bencana Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	70 Orang	100	165,375,000	-		Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	70 Orang	173.643.750



**RENCANA KERJA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BELITUNG TIMUR
TAHUN 2024**

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024							Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target				
1.06.06.01.02	Penyediaan Sandang															
	Penyediaan Sandang	Persentase Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Perlindungan sosial Bencana Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Kab. Belitang Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	70 Orang	100	110,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	70 Orang	115.762.500		
1.06.06.01.03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi															
	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Persentase Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Perlindungan sosial Bencana Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Kab. Belitang Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	2 Unit	100	66,150,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Unit	69.457.500		
1.06.06.01.04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan															
	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Persentase Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Perlindungan sosial Bencana Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Kab. Belitang Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	70 Orang	100	66,150,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	70 Orang	69.457.500		



**RENCANA KERJA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BELITUNG TIMUR
TAHUN 2024**

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
1.06.06.01.05	Pelayanan Dukungan Psikososial														
		Persentase Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Perlindungan sosial Bencana Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Kab. Belitang Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	70 Orang	100	137,812,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	70 Orang	144.703.125	
1.06.06.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota							1,047,375,000						1.099.743.750	
1.06.06.02.01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana														
		Persentase Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Belitang Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	3 Kampung	100	110,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Kampung	115.762.500	
1.06.06.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana														
		Persentase Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Belitang Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	70 Orang	100	937,125,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	70 Orang	983.981.250	



RENCANA KERJA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BELITUNG TIMUR
TAHUN 2024

Kode	Urusan / Bidang / Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN									49.777.875		
1	06	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota									49.777.875		
1	06	07	2.01	01	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota											
					Persentase taman makam pahlawan yang terkelola	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota yang dipelihara	Kab. Belitang Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	1 Dokumen	100	47,407,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1 Dokumen	49.777.875
1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									10.143.150.684		
1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									6.494.872.262		
1	06	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
					Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelaporan Keuangan dan Aset yang disusun sesuai standar	Kab. Belitang Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	31 Orang/bulan	100	6,185,592,630	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang/bulan	6.494.872.262
1	06	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									64.335.009		
1	06	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan											



**RENCANA KERJA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BELITANG TIMUR
TAHUN 2024**

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
		Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase aparatur yang berkinerja baik	Kab. Belitang Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	12 Orang	100	61,271,438	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	12 Orang	64.335.009		
1	06	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					791,461,928			831.035.025				
1	06	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
					Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase Pemenuhan Sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Belitang Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	1 Paket	100	37,705,500	Penerimaan Pembiayaan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	39.590.775
1	06	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
					Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Pemenuhan Sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Belitang Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	1 Paket	100	84,837,375	Penerimaan Pembiayaan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	89.079.244
1	06	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga											
					Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Persentase Pemenuhan Sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Belitang Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	1 Paket	100	2,513,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	2.639.385
1	06	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											



**RENCANA KERJA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BELITUNG TIMUR
TAHUN 2024**

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
		Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase Pemenuhan Sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	1 Paket	100	178,676,442	Penerimaan Pembiayaan		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	187.610.264
1	06	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
		Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Pemenuhan Sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	1 Paket	100	44,523,911	Penerimaan Pembiayaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	46.750.107
1	06	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
		Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Pemenuhan Sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	12 Laporan	100	33,075,000	Penerimaan Pembiayaan		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	34.728.750
1	06	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
		Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	12 Laporan	100	377,055,000	Penerimaan Pembiayaan		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	395.907.750
1	06	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD									



**RENCANA KERJA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BELITONG TIMUR
TAHUN 2024**

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
		Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase Pemenuhan Sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Belitong Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	6 Dokumen	100	33,075,000	Penerimaan Pembiayaan		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	6 Dokumen	34.728.750		
1	06	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					517,819,113			543.710.069				
1	06	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
					Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Persentase paket pengadaan barang & jasa yang dilaksanakan sesuai SOP	Kab. Belitong Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	1 Unit	80	330,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	347.287.500
1	06	01	2.07	05	Pengadaan Mebel											
					Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Persentase paket pengadaan barang & jasa yang dilaksanakan sesuai SOP	Kab. Belitong Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	3 Unit	80	37,705,500	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	39.590.775
1	06	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
					Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase paket pengadaan barang & jasa yang dilaksanakan sesuai SOP	Kab. Belitong Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	7 Unit	80	55,125,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	57.881.250
1	06	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											



**RENCANA KERJA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BELITUNG TIMUR
TAHUN 2024**

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target				
		Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Persentase paket pengadaan barang & jasa yang dilaksanakan sesuai SOP	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	72 Unit	80	94,238,613	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	72 Unit	98.950.544		
1	06	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1,404,843,261			1.475.085.424				
1	06	01	2.08	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
					Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penyediaan Jasa Penunjang Kantor	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	12 Laporan	100	172,109,897	Penerimaan Pembiayaan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	180.715.392
1	06	01	2.08	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
					Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase penyediaan Jasa Penunjang Kantor	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	12 Laporan	100	134,734,320	Penerimaan Pembiayaan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	141.471.036
1	06	01	2.08	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
					Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase penyediaan Jasa Penunjang Kantor	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	12 Laporan	100	1,097,999,044	Penerimaan Pembiayaan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.152.898.996
1	06	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					699,155,138			734.112.895				
1	06	01	2.09	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											



**RENCANA KERJA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BELITUNG TIMUR
TAHUN 2024**

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
		Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	1 Unit	80	468,512,138	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	491.937.745
1	06	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
		Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	22 Unit	80	110,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 Unit	115.762.500
1	06	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
		Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	13 Unit	80	27,562,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	28.940.625
1	06	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
		Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	12 Unit	80	37,705,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	39.590.775
1	06	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									



**RENCANA KERJA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BELITONG TIMUR
TAHUN 2024**

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
		Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	Kab. Belitong Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	16 Unit	80	55,125,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	16 Unit	57.881.250		
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							2,480,625,000			2.604.656.250				
2	08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							2,480,625,000			2.604.656.250				
2	08	02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN							771,750,000			810.337.500			
2	08	02	2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota							385,875,000			405.168.750		
2	08	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG											
					Persentase pelaksanaan RAD PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Belitong Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80	1 Dokumen	100	110,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	115.762.500
2	08	02	2.01	03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG											



**RENCANA KERJA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BELITUNG TIMUR
TAHUN 2024**

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
		Persentase pelaksanaan RAD PUG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80	32 Perangkat Daerah	100	220,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	32 Perangkat Daerah	231.525.000	
2	08	02	2.01	04	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG										
		Persentase pelaksanaan RAD PUG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80	32 Perangkat Daerah	100	55,125,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	32 Perangkat Daerah	57.881.250	
2	08	02	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota				220,500,000						231.525.000



**RENCANA KERJA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BELITANG TIMUR
TAHUN 2024**

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024							Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target				
2.08.02.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi															
	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Belitang Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50	1 Dokumen	100	220,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	231.525.000			
2.08.02.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota							165,375,000					173.643.750			
2.08.02.03.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota															
	Jumlah IR yang terbina	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kab. Belitang Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80	1 Lembaga	100	165,375,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	1 Lembaga	173.643.750			
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN							441,000,000					463.050.000			
2.08.03.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota							110,250,000					115.762.500			
2.08.03.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota															



**RENCANA KERJA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BELITUNG TIMUR
TAHUN 2024**

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
		Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Koordinasi terkait Pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak	Kab. Belitang Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	1 Dokumen	100	110,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	115.762.500	
2	08	03	2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota					165,375,000			173.643.750,00			
2	08	03	2.02	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota											
				Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Persentase Layanan Rujukan bagi Perempuan Korban Kekerasan	Kab. Belitang Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	10 Orang	100	165,375,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	10 Orang	173.643.750
2	08	03	2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					165,375,000			173.643.750,00			
2	08	03	2.03	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota											



**RENCANA KERJA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BELITONG TIMUR
TAHUN 2024**

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
		Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Belitong Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	50 Orang	100	165,375,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	50 Orang	173.643.750	
2	08	04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA						165,375,000			173.643.750			
2	08	04	2.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota						165,375,000			173.643.750		
2	08	04	2.03	01	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota										
				Jumlah Keluarga yang terlayani	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Persentase Keluarga yang terlayani	Kab. Belitong Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50	25 Layanan	100	165,375,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	25 Layanan	173.643.750
2	08	05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK						165,375,000			173.643.750			
2	08	05	2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						165,375,000			173.643.750		



**RENCANA KERJA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BELITUNG TIMUR
TAHUN 2024**

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
2.08.05.2.01.01		Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota													
		Jumlah Dokumen data gender yang tersedia	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Persentase Dokumen data gender yang tersed	Kab. Belitang Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1	1 Dokumen	100	165,375,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	173.643.750	
2.08.06		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)							441,000,000					463.050.000	
2.08.06.2.01		Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota							441,000,000					463.050.000	
2.08.06.2.01.01		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota													
		Forum Anak Desa	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Persentase Kabupaten Layak Anak	Kab. Belitang Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9 Desa	5 Organisasi	100	220,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	5 Organisasi	231.525.000	
2.08.06.2.01.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota													



**RENCANA KERJA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BELITANG TIMUR
TAHUN 2024**

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
		Forum Anak Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Kabupaten Layak Anak	Kab. Belitang Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9 Desa	1 Dokumen	100	220,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	231.525.000		
2	08	07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK						496,125,000		520.931.250					
2	08	07	2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					220,500,000		231.525.000					
2	08	07	2.02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											
					Persentase anak yang mendapat layanan dalam kategori perlindungan khusus	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Belitang Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	10 Orang	100	220,500,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Men dapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	231.525.000
2	08	07	2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					275,625,000		289.406.250					
2	08	07	2.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											



**RENCANA KERJA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BELITUNG TIMUR
TAHUN 2024**

Kode	Urusan / Bidang / Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target		
		Persentase anak yang mendapat layanan dalam kategori perlindungan khusus	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Belitang Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	1 Dokumen	100	275,625,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	289.406.250
TOTAL									17,673,982,308					18.561.978.924



BAB V PENUTUP

5.1 CATATAN PENTING

Dokumen rancangan akhir rencana kerja tahunan ini merupakan acuan bagi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2024. Keseluruhan kegiatan yang dirangkum diharapkan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan tingkat urgensi yang terukur dari kebutuhan masing-masing urusan. Masing-masing matrik yang disajikan adalah hasil telaah yang objektif terhadap kondisi pelaksanaan program ditahun yang lalu, serta proyeksi akurat terhadap kebutuhan masing-masing urusan ditahun yang akan datang.

Output Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitong Timur adalah Program Tahunan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitong Timur.

Rancangan akhir Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitong Timur selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2024 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2024, RENJA juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitong Timur. Rancangan akhir RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

5.2 KAJIDAH-KAJIDAH PELAKSANAAN.

Dalam mengimplementasikan pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitong Timur Tahun 2024, perlu memperhatikan kaidah-kaidah sebagai berikut:

1. Memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2021 dan 2022;
2. Memperhatikan masalah yang dihadapi pada pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2021 dan 2022;
3. Memperhatikan sumber dana yang dimiliki dan yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
4. Memperhatikan sasaran, tujuan dan target dari tiap indikator yang telah ditetapkan dan harus dicapai;
5. Memperhatikan keberlanjutan program yang terdapat pada Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selama lima tahun, untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan.



5.3 RENCANA TINDAK LANJUT

Untuk mengantisipasi target yang tidak tercapai atau bahkan capaian yang melebihi target yang telah ditetapkan dari pelaksanaan program dan kegiatan maka diperlukan instrumen pengendalian dan evaluasi. Pengendalian dan evaluasi tersebut terdiri dari pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan evaluasi terhadap hasil rencana kerja. Evaluasi terhadap hasil rencana kerja dilaksanakan secara periodik setiap triwulanan terkait program/kegiatan, kinerja dan anggaran, permasalahan dan faktor pendorong dan penghambat serta rencana tindak lanjut yang diperlukan.

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
Kabupaten Belitang Timur,



RONNY SETIAWAN, S. IP, M.PA

Pembina Utama Muda

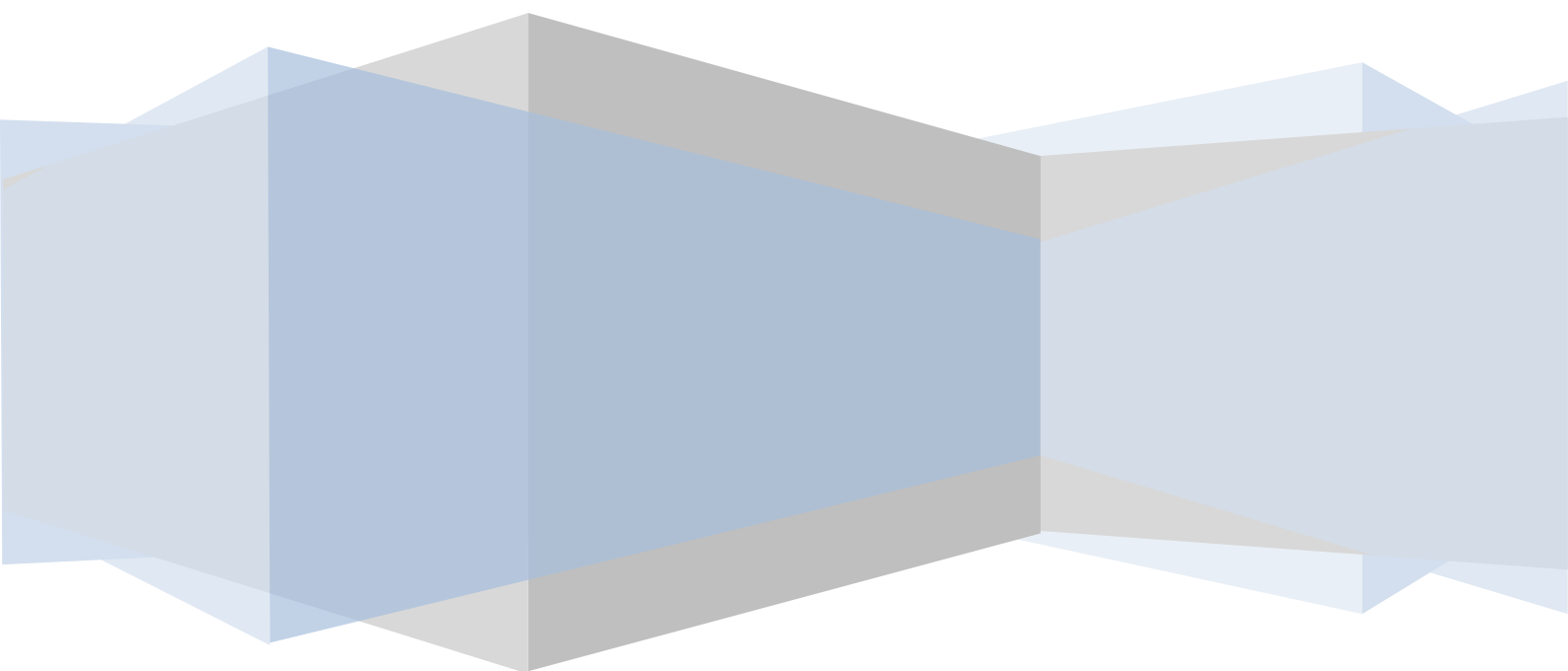
NIP. 19751023 200112 1 005

LAMPIRAN

RENCANA KERJA 2024

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

KABUPATEN BELITUNG TIMUR



**Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Timur
Tahun 2024**

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	TindakLanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja.	√			
2.	Pengolahan data dan informasi.	√			
3.	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
4.	Mengkaji hasil evaluasi renja Perangkat Daerah kabupaten/kota tahun lalu berdasarkan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
5.	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
6.	Penelaahan rancangan awal RKPD kabupaten/kota.	√			
7.	Perumusan tujuan dan sasaran.	√			
8.	Penelaahan usulan masyarakat.	√			
9.	Perumusan kegiatan prioritas.	√			
10.	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
10.a	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan.		√		Tidak ada Usulan dari Kecamatan
10.b	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
10.c	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.	√			
10.d	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing masing Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai surat edaran bupati/wali kota.	√			
11.	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.	√			
12.	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
13.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/kota telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju.	√			
14.	Dokumen Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah disyahkan.	√			

Manggar, April 2023
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa
Kabupaten Belitung Timur,



RONNY SETIAWAN, S. IP, M.PA
Pembina Utama Muda

NIP. 19751023 200112 1 005